

CATATAN AKHIR TAHUN 2025

Setelah Bencana Ekologis Sumatera,
Menata Ulang Tata Ruang & Cabut Izin Korporasi di DAS

JARINGAN KERJA PENYELAMAT HUTAN RIAU

CATATAN AKHIR TAHUN 2025

Setelah Bencana Ekologis Sumatera,
Menata Ulang Tata Ruang & Cabut Izin Korporasi di DAS

JARINGAN KERJA PENYELAMAT HUTAN RIAU

CATATAN AKHIR TAHUN 2025

Isi Rimba Tak Ada Lagi Tempat Berpijak

karya Iwan Fals, 1982

Raung bulldozer gemuruh pohon tumbang
Berpada dengan jerit isi rimba raya
Tawa kelakar badut-badut isi rimba raya
Tanpa HPH berbuat semaunya

Lestarikan alam hanya celoteh belaka
Lestarikan alam mengapa tidak dari dulu?
Oh, mengapa?

Jelas kami kecewa,
Menatap rimba yang dulu perkasa
Kini tinggal cerita
Pengantar lelap si buyung

Bencana erosi selalu menghantui
Tanah kering-kerontang banjir datang itu pasti
Isi rimba tak ada tempat berpijak lagi
Punah dengan sendirinya akibat rakus manusia

Jelas kami kecewa,
Mendengar gergaji tak pernah berhenti
Demi kantong pribadi
Tak ingat rezeki generasi nanti

Lestarikan hutan hanya celoteh belaka
Lestarikan hutan mengapa tidak dari dulu saja?



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya *Catatan Akhir Tahun (CAT) 2025 “Setelah Bencana Ekologis Sumatera, Menata Ulang Tata Ruang & Cabut Izin Korporasi di DAS”*. Publikasi ini disusun sebagai bentuk dokumentasi, refleksi, dan advokasi atas berbagai persoalan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terjadi sepanjang tahun 2025, khususnya di Provinsi Riau dan Pulau Sumatra.

Sepanjang 2025, rangkaian peristiwa seperti deforestasi, banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan, konflik agraria, serta krisis keanekaragaman hayati kembali terjadi secara berulang. Catatan ini menegaskan bahwa peristiwa tersebut tidak semata-mata dipicu oleh faktor alam, melainkan berkaitan erat dengan kerusakan lingkungan, lemahnya tata kelola ruang, serta perizinan usaha yang mengabaikan daya dukung ekosistem.

CAT Jikalahari 2025 merangkum temuan lapangan, analisis data dan media, serta evaluasi kebijakan pemerintah di sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Publikasi ini diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan masyarakat dalam mendorong perbaikan tata kelola lingkungan yang lebih adil dan berkelanjutan, termasuk penataan ulang tata ruang dan evaluasi izin di wilayah-wilayah rentan ekologis.

Akhir kata, kami berharap buku ini dapat memperkuat kesadaran publik dan mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat.

Pekanbaru, 2025

Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari)



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR GRAFIK	v
PROLOG.....	1
DEFORESTASI	4
PERISTIWA SDA-LH SEPANJANG 2025.....	14
1. KARHUTLA	14
2. BANJIR	22
3. LONGSOR	23
4. KONFLIK MASYARAKAT	24
5. KEANEKARAGAMAN HAYATI	25
6. RUANG KELOLA MASYARAKAT	26
7. PENCEMARAN LINGKUNGAN	27
8. KECELAKAAN KERJA	27
9. KLIPING MEDIA TERHADAP PERSOALAN SDA-LH DI RIAU	28
10. INISIATIF MASYARAKAT SIPIL	29
KEBIJAKAN NASIONAL DAN DAERAH SEKTOR SDA-LH SEPANJANG TAHUN 2025	33
KOMITMEN POLITIK NASIONAL DAN DAERAH	39
EPILOG.....	51





DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Luas Tutupan Hutan Alam dengan Luas Kabupaten/Kota	5
Tabel 2 Tutupan Hutan Tersisa dan Deforestasi di Riau Berdasarkan Grup PBPH di 2025	7
Tabel 3 Tingkat Deforestasi Korporasi PBPH/HPH Tahun 2025.....	7
Tabel 4 Tingkat Deforestasi Konsesi Sawit Tahun 2025	8
Tabel 5 Tingkat Deforestasi di Kawasan Konservasi Tahun 2025	10
Tabel 6 Sebaran Tutupan Hutan Alam dan Deforestasi di Provinsi Riau Berdasarkan Fungsi Kawasan Tahun 2025.....	11
Tabel 7 Seri Data Deforestasi Provinsi Riau Periode 1982–2025	12
Tabel 8 Luas Karhutla di Riau Periode 2021 - 2025.....	14
Tabel 9 Hotspot di Konsesi Group PBPH Sepanjang 2025	16
Tabel 10 Hotspot di Konsesi PBPH Sepanjang 2025	17
Tabel 11 Hotspot di Areal Konservasi Sepanjang 2025	19
Tabel 12 Perbandingan Hotspot Lahan Gambut dan Mineral Provinsi Riau Sepanjang 2025.....	20
Tabel 13 Hotspot Lahan Gambut Berdasarkan Kedalaman Gambut di Riau 2025	21
Tabel 14 Indeks Kebijakan Pemerintah Kabupaten/ Kota Riau Sepanjang 2025	49





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Tutupan Hutan Alam dan Deforestasi Provinsi Riau 2025	4
Gambar 2 Peta Tutupan Hutan Alam dan Deforestasi di Kawasan PBPH dan Sawit Provinsi Riau 2025	6
Gambar 3 Peta Tutupan Hutan Alam dan Deforestasi di Kawasan Konservasi Provinsi Riau 2025	10
Gambar 4 Peta Sebaran Hotspot Provinsi Riau Sepanjang 2025	16
Gambar 5 Peta Sebaran Hotspot Lahan Gambut Riau Sepanjang 2025	22





DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Tutupan Hutan Alam dan Deforestasi di Riau 2025	4
Grafik 2 Deforestasi Di Riau Per Kabupaten Sepanjang 2025	6
Grafik 3 Hotspot Riau Sepanjang 2025	15
Grafik 4 Hotspot per Kabupaten/ Kota di Riau Sepanjang 2025	15
Grafik 5 Hotspot Lahan Gambut dan Mineral Provinsi Riau Sepanjang 2025	20
Grafik 6 Pemberitaan Media terhadap Permasalahan SDA–Lingkungan Hidup di Riau Sepanjang 2025	28





PROLOG

Penghujung tahun 2025, bencana hidrometeorologi terjadi di Pulau Sumatra, tepatnya di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh. Bencana ini diperparah dengan adanya siklon tropis senyar yang menyebabkan cuaca ekstrem angin kencang, banjir dan longsor. Dampaknya, hingga 26 Desember 2025 terdapat 1.135 orang meninggal, 173 orang hilang, 489.864 mengungsi. Korban meninggal paling banyak di Aceh 503 orang, Sumut 371 orang dan Sumbar 261 orang. Selain korban jiwa, bencana Sumatra mengakibatkan 158.088 rumah, 1900 fasum, 875 fasilitas Pendidikan, 806 rumah ibadah, 734 jembatan, 291 kantor/bangunan dan 200 fasilitas Kesehatan rusak.¹

Jikalau hari menilai, bencana yang terjadi di Sumbar, Sumut dan Aceh tidak hanya karena faktor hujan dan siklon senyar, kerusakan ekologis merupakan faktor utama terjadinya bencana tersebut. Hilangnya tutupan hutan alam, alih fungsi hutan di daerah aliran sungai menyebabkan air hujan tidak terserap sehingga mempercepat terjadinya banjir yang membawa material berupa lumpur, batu serta kayu bekas penebangan hutan alam yang terjadi di bagian hulu.

Hilangnya hutan alam di daerah aliran Sungai disebabkan oleh korporasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Perkebunan sawit dan tambang. Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), kerusakan hutan dan daerah aliran sungai di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat mencapai 889 ribu hektar. Selain itu, terdapat 62 aktivitas tambang emas tanpa izin di Sumatera Barat (Kabupaten Solok dan Kabupaten Sijunjung) dan 5.208 hektar kawasan hutan dialihkan menjadi perkebunan kelapa sawit oleh 14 Korporasi di Provinsi Aceh.²

Atas desakan publik terkait penyebab banjir di Sumbar, Sumut dan Aceh, Kementerian Kehutanan mengumumkan akan mencabut 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) bermasalah di Sumatera yang diduga kuat berkontribusi terhadap banjir dan longsor. Lalu, Kementerian Lingkungan Hidup juga memberikan sanksi administrasi paksaan menghentikan kegiatan dan dilakukan pemeriksaan lanjutan berupa audit lingkungan. Hasil audit ini akan memutuskan untuk diberikan sanksi administrasi, perdata atau pidana.


Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menjelaskan sanksi administrasi penghentian kegiatan delapan Korporasi pemicu banjir Sumatera bukan karena masalah izin, melainkan karena masalah kerusakan lingkungan. Korporasinya adalah PT Agincourt Resources, PT Toba Pulp Lestari, Sarulla Operations Ltd, PT Sumatera Pembangkit Mandiri, PT Teluk Nauli, PT North Sumatera Hydro Energi, PT Multi Sibolga Timber, dan PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Batang Toru.

Pencabutan izin korporasi dan pemberian sanksi administrasi oleh Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup tidak menutup bencana di masa mendatang. Pemerintah harus mengubah tata ruang untuk menjadikan areal eks korporasi yang dicabut untuk dijadikan areal lindung untuk dilakukan pemulihan. Ini dimungkinkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

¹ <https://dataindonesia.id/varia/detail/update-banjir-sumatra-24-desember-2025-1112-meninggal-158088-rumah-dan-1900-fasum-rusak>

² <https://www.jawapos.com/nasional/016935683/889-ribu-hektare-hutan-serta-das-di-aceh-sumut-dan-sumbar-dalam-keadaan-rusak-walhi-desak-cabut-izin-usaha-13-perusahaan>





Pada bagian keenam pasal 92 peninjauan kembali Rencana Tata Ruang (RTR) meliputi peninjauan kembali terhadap rencana umum tata ruang dan peninjauan kembali terhadap rencana rinci tata ruang, lalu pasal 93 ayat 2, peninjauan kembali RTR dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis salah satunya bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Bencana Sumatra harus menjadi pelajaran pemerintah untuk melakukan evaluasi izin korporasi baik PBPH, sawit maupun tambang yang berada di sekitar daerah aliran sungai. Di Riau, ini menjadi peringatan untuk segera berbenah tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan.

Temuan Jikalahari, terdapat banyak konsesi PBPH dan sawit berada di sepanjang aliran sungai besar di Riau. Misalnya di sungai Kampar terdapat 29 izin PBPH dan sawit. Sungai Indragiri terdapat 34 izin PBPH dan sawit serta Sungai Rokan terdapat 64 izin PBPH dan sawit. Korporasi ini menebang hutan alam, menanam akasia dan sawit yang menyebabkan daya resap air berkurang sehingga mengakibatkan banjir ketika hujan.

Kejadian banjir pada 2023 dan 2024 di Riau merupakan peringatan bagi Pemprov Riau. Hasil penelusuran Jikalahari, pada 2023 - 2024 ada 261 kejadian banjir di 592 lokasi tersebar di seluruh kabupaten/kota di Riau. Kejadian banjir terbanyak terjadi pada 2023 mencapai 79 kali di 142 lokasi. Bahkan banjir juga menelan korban jiwa. Enam warga meninggal dunia pada 2019—lima orang di Rokan Hulu, satu di Kuantan Singingi— dan dua orang lainnya pada awal 2024—Pekanbaru dan Rokan Hilir—terseret arus banjir.

Selain banjir, persoalan lingkungan hidup dan kehutanan lainnya juga sering terjadi di Riau, seperti karhutla, perambahan, konflik agraria serta konflik satwa dengan manusia. Semua persoalan ini akan selesai jika pemerintah mau membenahi tata kelola SDA LH melalui evaluasi perizinan. Persoalan ini Jikalahari rangkum dalam Catatan Akhir Tahun (CAT) 2025.

CAT Jikalahari 2025 hadir untuk menyajikan persoalan lingkungan hidup dan kehutanan yang terjadi dan berulang di Riau, lalu upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah baik secara kebijakan maupun tindakan langsung oleh pemerintah. Jikalahari menegaskan bahwa tanpa perubahan total penataan ruang—termasuk pencabutan izin terutama di daerah aliran sungai, gambut, dan hutan alam tersisa—bencana akan terus berulang dan lingkungan akan terus dikorbankan atas nama investasi



Setelah Bencana Ekologis Sumatera,
Menata Ulang Tata Ruang & Cabut Izin Korporasi di DAS

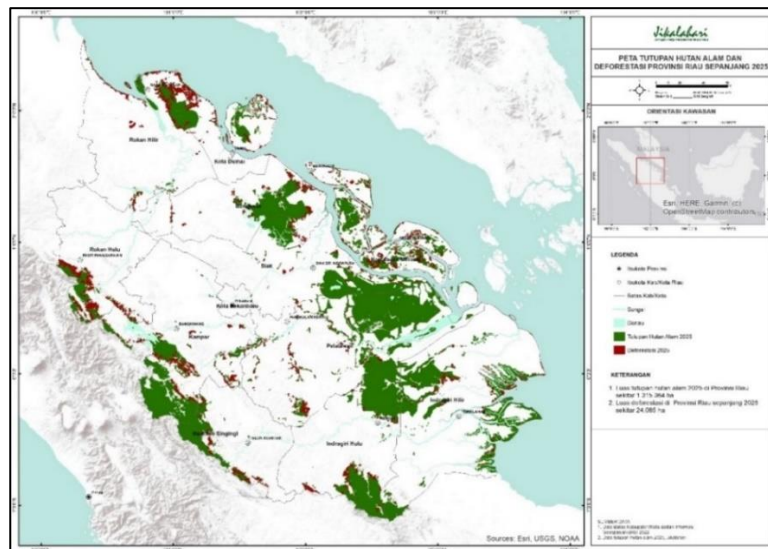
BAGIAN I: DEFORESTASI



DEFORESTASI

Deforestasi masih menjadi salah satu persoalan utama lingkungan hidup di Indonesia sepanjang 2025, termasuk di Provinsi Riau. Jikalahari secara konsisten melakukan analisis deforestasi tahunan untuk memantau hilangnya tutupan hutan alam, sekaligus mengidentifikasi pola, lokus, dan aktor yang terlibat dalam perusakan ruang ekologis. Analisis ini tidak berhenti pada penghitungan luasan hutan yang hilang, tetapi diarahkan untuk mengetahui di mana deforestasi paling banyak terjadi, pada jenis guna lahan apa deforestasi berlangsung, serta pihak yang paling bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

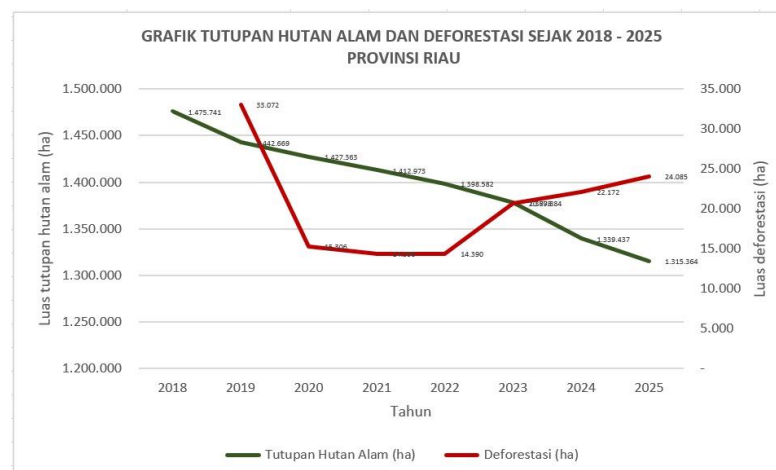
Gambar 1. Peta Tutupan Hutan Alam dan Deforestasi Provinsi Riau 2025



Sumber: Olah Data Jikalahari, 2025

Hasil analisis Jikalahari terhadap bukaan tutupan hutan alam (deforestasi) di Riau melalui interpretasi visual citra satelit Sentinel-2 menunjukkan bahwa deforestasi sepanjang 2025 mencapai 24.085 hektar, meningkat 1.913 hektar dibandingkan tahun sebelumnya. Di samping itu tutupan hutan alam yang tersisa di Riau tercatat seluas 1.315.364 hektar.

Grafik 1. Tutupan Hutan Alam dan Deforestasi di Riau 2025



Sumber: Olah Data Jikalahari, 2025



Dari grafik Tutupan Hutan Alam dan Deforestasi di Riau 2025 terlihat bahwa terjadi penurunan hotspot pada 2020, namun secara konsisten mengalami peningkatan hingga ke tahun 2025.

Tutupan hutan alam tersebar hampir di seluruh kabupaten/kota di Riau. Berikut data luasan tutupan hutan dibandingkan dengan luas wilayah kabupaten/kota se Riau.

Tabel 1. Perbandingan Luas Tutupan Hutan Alam dengan Luas Kabupaten/Kota

Kabupaten / Kota	Luas Kabupaten / Kota (ha)	Luas Tutupan Hutan Alam (ha)	%
Bengkalis	842.690	104.628	12
Indragiri Hilir	1.341.269	201.037	15
Indragiri Hulu	826.745	203.283	25
Kampar	1.056.334	162.774	15
Kepulauan Meranti	362.488	83.219	23
Dumai	202.603	20.903	10
Pekanbaru	63.839	-	-
Kuantan Singingi	529.852	67.772	13
Pelalawan	1.305.981	224.267	17
Rokan Hilir	928.189	59.109	6
Rokan Hulu	734.900	50.351	7
Siak	802.516	138.021	17
Grand Total	8.997.407	1.315.364	

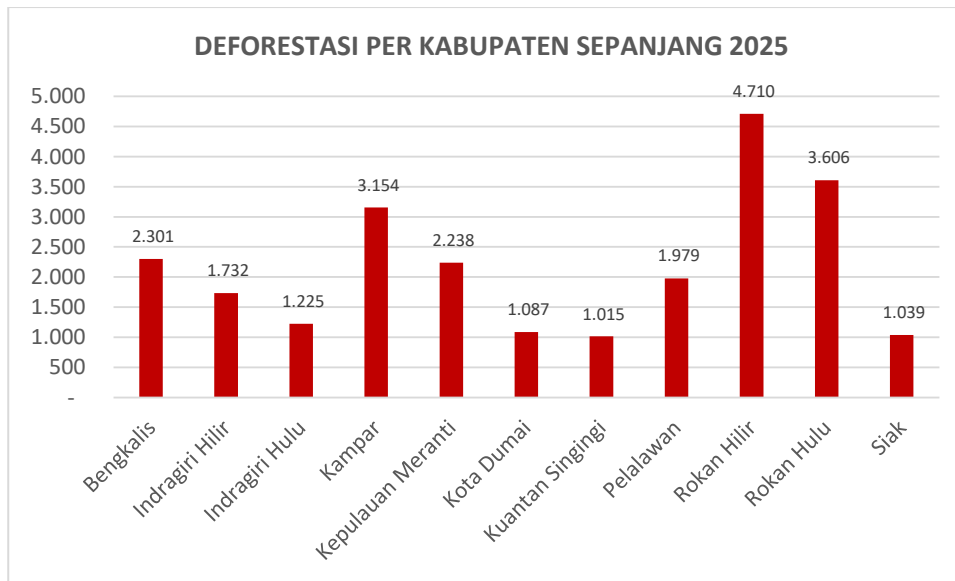
Sumber: Olah Data Jikalauhari, 2025

Dari tabel Perbandingan Luas Tutupan Hutan Alam dengan Luas Kabupaten/Kota, menunjukkan bahwa tidak ada satupun kabupaten/kota di Provinsi Riau yang memiliki tutupan hutan mencapai 30%. Kota Pekanbaru tidak memiliki tutupan hutan alam disusul dengan Rokan Hilir yang hanya memiliki tutupan hutn alam seluas 6% dari total luas kabupaten. Sementara itu, Indragiri Hulu adalah daerah dengan persentase tutupan hutan alam tertinggi sebesar 25%.

Sementara itu, deforestasi tertinggi terjadi di Kabupaten Rokan Hilir, dengan kehilangan tutupan hutan sekitar 4.710 hektar atau sekitar 20 persen dari total deforestasi Riau sepanjang tahun. Grafik berikut menampilkan sebaran dan besaran deforestasi di Provinsi Riau sepanjang 2025.



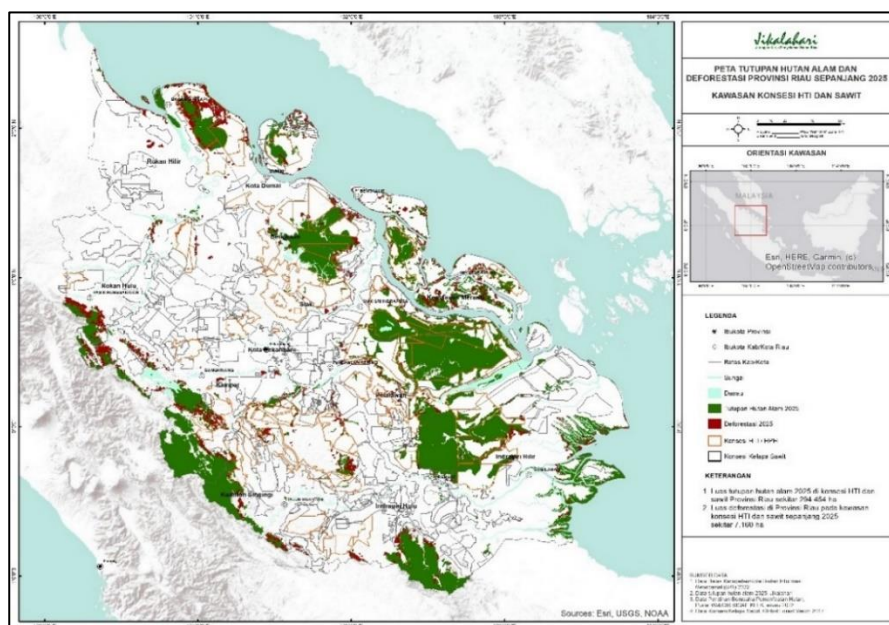
Grafik 2. Deforestasi Di Riau Per Kabupaten Sepanjang 2025



Sumber: Olah Data Jikalahari, 2025

Jikalahari juga mencatat bahwa tutupan hutan alam masih ditemukan di dalam areal konsesi kehutanan PBPH dan perkebunan sawit seluas 294.454 hektar. Deforestasi yang terjadi di kawasan konsesi PBPH mencapai 4.946 hektar atau 21 persen dan sawit 2.215 hektar atau 9 persen dari total deforestasi Riau pada 2025.

Gambar 2. Peta Tutupan Hutan Alam dan Deforestasi di Kawasan PBPH dan Sawit Provinsi Riau 2025



Sumber: Olah Data Jikalahari, 2025

Berdasarkan pengelompokan Korporasi PBPH, data menunjukkan bahwa sebagian tutupan hutan alam masih berada di wilayah kerja grup-grup PBPH, sementara aktivitas deforestasi juga terus terjadi di dalam konsesi tersebut sepanjang tahun 2025.



Tabel 2. Tutupan Hutan Tersisa dan Deforestasi di Riau Berdasarkan Grup PBPH di 2025

GROUP	TUTUPAN HUTAN ALAM (HA)	DEFORESTASI (HA)	PERSENTASE DEFORESTASI (%)
APRIL	104.778	714	14
APP	117.306	1.143	23
Unkwon	44.581	3.089	62
Total	266.666	4.946	

Sumber: Olah Data Jikalauhari, 2025

Lima Korporasi PBPH dengan tingkat deforestasi tertinggi adalah PT Diamond Raya Timber, PT Suntara Gajapati, PT Riau Andalan Pulp & Paper, PT Arara Abadi, dan PT Balai Kayang Mandiri.

Tabel 3. Tingkat Deforestasi Korporasi PBPH/HPH Tahun 2025

KORPORASI	GROUP	DEFORESTASI (HA)
PT DIAMOND RAYA TIMBER	Unknown	3.089
PT SUNTARA GAJAPATI	APP	392
PT RIAU ANDALAN PULP & PAPER	APRIL	174
PT ARARA ABADI	APP	155
PT BALAI KAYANG MANDIRI	APP	125
PT PERAWANG SUKSES PERKASA	APP	108
PT WANANUGRAHA BINALESTARI	APRIL	104
PT SATRIA PERKASA AGUNG	APP	95
PT SELARAS ABADI UTAMA	APRIL	93
PT RUAS UTAMA JAYA	APP	90
PT SUMATERA RIANG LESTARI	APRIL	88
PT MUTIARA SABUK KHATULISTIWA	APP	73
PT BINA DUTA LAKSANA	APP	64
PT BINA DAYA BINTARA	APRIL	57
PT NUSA WANA RAYA	APRIL	43
PT NUSANTARA SENTOSA RAYA	APRIL	42
PT MADUKORO	APRIL	34
PT MITRA TANI NUSA SEJATI	APRIL	27
PT SEKATO PRATAMA MAKMUR	APP	22



KUD BINA JAYA LANGGAM	APRIL	20
CV MUTIARA LESTARI	APRIL	15
PT BUKIT BATU HUTANI ALAM	APP	11
PT SERAYA SUMBER LESTARI	APRIL	10
PT RIAU INDO AGROPALMA	APP	7
PT RIMBA MUTIARA PERMAI	APRIL	5
PT BINA DAYA BENTALA	APP	4
PT CITRA SUMBER SEJAHTERA	APRIL	2
GRAND TOTAL		4.946

Sumber: Olah Data Jikalauhari, 2025

Pada sektor perkebunan kelapa sawit, deforestasi tertinggi sepanjang 2025 tercatat terdapat di konsesi PT Wana Subur Sawit Indah, PT Anugerah Niaga Sawindo, PT Uni Seraya, PT Arvena Sepakat, dan PT Toba Indah.

Tabel 4. Tingkat Deforestasi Konsesi Sawit Tahun 2025

KORPORASI	DEFORESTASI (HA)
PT WANA SUBUR SAWIT INDAH	325,02
PT ANUGERAH NIAGA SAWINDO	290,55
PT UNI SERAYA	172,68
PT ARVENA SEPAKAT	157,93
PT TOBA INDAH	139,98
PT BINA RUPAT SEPANG LESTARI	139,79
PT SAKTI SAWIT JAYA	96,87
PT LANGGAM INTI HIBRINDO	95,52
PT SURYA BUANA BERSAMA	79,35
PT BARITO RIAU JAYA	74,80
PT MUSIM MAS	68,93
PT SINDORA SERAYA	67,58
PT DUET RIJA	66,54
PT SUMBER MUTIRA INDAH PERSADA	51,65
PT TRIDAYARI MANDIRI UTAMA	41,19
PT TRIOMAS FDI	35,00



PT SAWIT ROKAN SEMESTA	33,75
PT PERMATA SAWIT PERMAI	26,66
PT BUDIDAKSA DWI KUSUMA	25,86
PT SUMBER SAWIT SEJAHTERA	23,28
PT TANI SUBUR MAKMUR	18,27
PT TRI BAKTI SARIMAS	17,31
PT TRISETYA USAHA MANDIRI	17,03
PT MESKOM AGRO SARIMAS	17,01
PT SURYA INTI SARI RAYA	14,79
PT BAYU AGRIFIKA	13,18
PT PERKEBUNAN II	12,03
PT TEGUH KARSAWANA LESTARI	9,38
PT GELOLA SAWITA MAKMUR	8,06
PT KARYA TAMA BAKTI MULYA	7,52
PT MITRA UNGGUL PUSAKA	7,52
PT KARYATAMA BAKTI MULIA	6,02
PT TANI SWADAYA PERDANA	5,86
PT SAFARI RIAU	5,81
PT SABIRA NEGERIUTAMA	5,53
PT MEKARSARI ALAM LESTARI	4,95
PT BUMI DAYA PLANTATION	4,44
PT PUSAKA MEGAH BUMI NUSANTARA	4,14
PT SUMBER MUTIARA INDAH PERDANA	3,66
PT SRI ANUGRAH	3,45
PT SUNTAI JAYA SATRIA	3,04
PT KURNIA MAS	2,50
PT PEPUTRA SUPRA JAYA	1,79
PT TH INDO PLANTATIONS	1,79
PT SURYA DUMAI AGRINDO	1,69
PT SINAR SAWIT SEJAHTERA	1,64
PT BLANGKOLAM	0,96

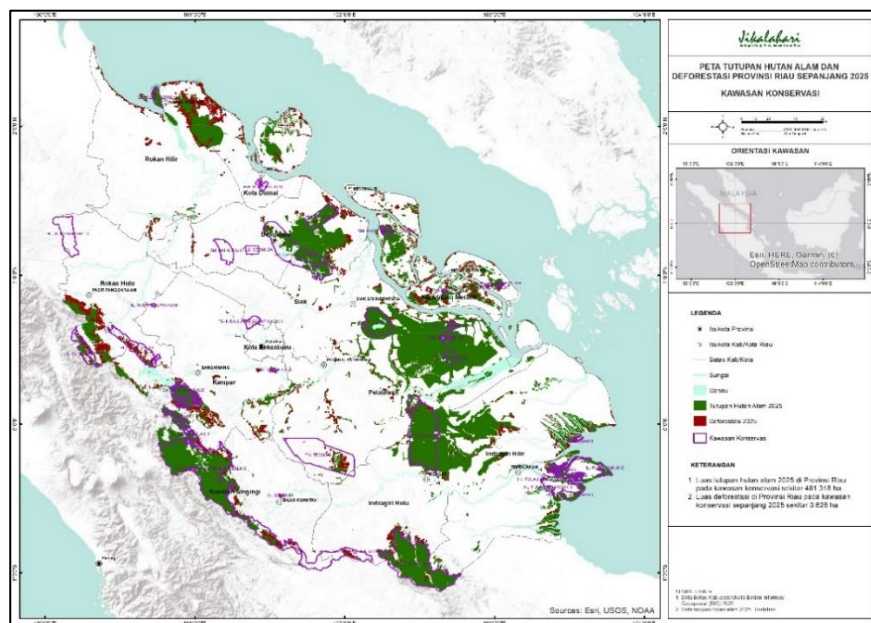


PT AGRI PRIMA	0,94
PT SIDOMARGA PERKASA	0,75
PT RAMAJAYA PRAMUKTI	0,38
PT INTI INDO SAWIT SUBUR	0,38
PT SARPINDOGRAHA SAWIT TANI	0,12
PT TESO INDAH	0,01
GRAND TOTAL	2.215

Sumber: Olah Data Jikalahari, 2025

Selain terjadi di kawasan konsesi, deforestasi juga terdapat di wilayah konservasi. Peta berikut memperlihatkan sebaran deforestasi di kawasan konservasi yang ada di Provinsi Riau sepanjang 2025.

Gambar 3. Peta Tutupan Hutan Alam dan Deforestasi di Kawasan Konservasi Provinsi Riau 2025



Sumber: Olah Data Jikalahari, 2025

Kawasan dengan tingkat kehilangan tutupan hutan tertinggi meliputi Hutan Lindung Bukit Batabuh Lubuk Jambi, Taman Nasional Tesso Nilo, Hutan Lindung Bukit Suligi, Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling, serta Hutan Lindung Sungai Rokan.

Tabel 5. Tingkat Deforestasi di Kawasan Konservasi Tahun 2025

NAMA KAWASAN	DEFORESTASI (HA)
HL. BUKIT BATABUH LUBUK JAMBI	911
TN. TESO NILLO	618



HL. BUKIT SULIGI	527
SM. BUKIT RIMBANG BUKIT BALING	270
HL. SUNGAI ROKAN	253
SM. KERUMUTAN	197
HL. BATANG ULAK II	163
HL. BATANG ULAK I	138
SM. GIAM SIAK KECIL	118
TWA. BULUH CINA	109
TN. BUKIT TIGAPULUH	99
SM. BUKIT BATU	98
HL. PULAU CAWAN	85
CA PULAU BERKEY	18
CA. BUKIT BUNGKUK	9
HL. PULAU PISANG	7
HL. TASIK AIR PUTIH	6
GRAND TOTAL	3.626

Sumber: Olah Data Jikalahari 2025

Sebaran deforestasi di Riau sepanjang 2025 menunjukkan bahwa kehilangan hutan terkonsentrasi pada ruang-ruang yang telah mengalami perubahan fungsi. Dari total deforestasi seluas 24.085 hektar, kehilangan terbesar terjadi di kawasan lainnya yang mencapai 13.299 hektar atau 55 persen. Di dalam konsesi PBPH dan perkebunan sawit, deforestasi tercatat seluas 7.160 hektar atau sekitar 30 persen, dan di kawasan konservasi mencapai 3.626 hektar atau 15 persen.

Tabel 6. Sebaran Tutupan Hutan Alam dan Deforestasi di Provinsi Riau Berdasarkan Fungsi Kawasan Tahun 2025

	Tutupan Hutan Alam (ha)	Deforestasi (ha)	Persentase Hutan Alam (%)	Persentase Deforestasi (%)
RIAU	1.315.364	24.085		
PBPH	266.666	4.946	20	21
SAWIT	27.787	2.215	2	9
KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG	481.318	3.626	37	15
KAWASAN LAINNYA*	539.592	13.299	41	55

Sumber: Olah Data Jikalahari 2025



*kawasan lainnya adalah daratan Riau selain konsesi PBPH, konsesi sawit, dan kawasan konservasi meliputi kawasan hutan produksi tetap, hutan produksi yang dapat di konversi, dan areal penggunaan lainnya.

Selain analisis tahunan, Jikalahari juga menyusun seri data deforestasi Provinsi Riau periode 1982–2025. Berdasarkan seri data tersebut, total deforestasi yang terjadi di Riau selama lebih dari empat dekade mencapai 5.395.918 hektar.

Tabel 7. Seri Data Deforestasi Provinsi Riau Periode 1982–2025

TAHUN	TUTUPAN HUTAN ALAM (ha)	DEFORESTASI (ha)
1982	6.727.546	-
2002	3.380.328	3.347.218
2012	2.005.565	1.374.763
2015	1.645.206	360.359
2017	1.489.410	155.796
2018	1.475.741	13.669
2019	1.442.669	33.072
2020	1.427.363	15.306
2021	1.412.973	14.390
2022	1.398.582	14.390
2023	1.377.884	20.698
2024	1.339.437	22.172
2025	1.315.364	24.085
	TOTAL DEFORESTASI	5.395.918

Sumber: Olah Data Jikalahari 2025

Dari tabel Seri Data Deforestasi Provinsi Riau Periode 1982–2025 menggambarkan akumulasi kehilangan hutan alam Riau dalam jangka panjang dan menunjukkan skala perubahan tutupan hutan yang terjadi sejak awal pembukaan kawasan hingga tahun 2025.



BAGIAN II: POTRET PERISTIWA SDA-LH SEPANJANG 2025



POTRET PERISTIWA SDA-LH SEPANJANG 2025

Sejalan dengan peningkatan deforestasi, berbagai persoalan sumber daya alam dan lingkungan hidup (SDA-LH) juga meningkat. Bagian ini menyajikan catatan peristiwa SDA-LH yang terjadi di Provinsi Riau sepanjang tahun 2025. Catatan ini dilakukan untuk melihat dinamika, sebaran, dan karakter peristiwa ekologis yang berlangsung dalam satu tahun, berdasarkan kompilasi data, temuan lapangan, serta penelusuran informasi yang dihimpun Jikalahari. Untuk memudahkan pembacaan dan analisis, peristiwa SDA-LH sepanjang 2025 dikelompokkan ke dalam sembilan indikator utama, yakni kebakaran hutan dan lahan (karhutla), banjir dan longsor, kecelakaan kerja, konflik masyarakat, konflik satwa, ruang kelola masyarakat, pencemaran lingkungan, potret pemberitaan media terhadap permasalahan SDA-lingkungan hidup di Riau, serta inisiatif masyarakat sipil.

1. Karhutla

Berdasarkan kompilasi data Sistem Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan (*SiPongi*) Kementerian Kehutanan (Kemenhut) yang dihimpun Jikalahari, kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau sepanjang periode 2021–2025 menunjukkan tren yang kembali meningkat. Setelah sempat mengalami penurunan pada 2021 dan 2022, luas kawasan terbakar kembali meningkat sejak 2023 hingga 2025. Sepanjang 2025, luas kebakaran hutan dan lahan di Riau mencapai 19.671 hektar, meningkat tajam sebesar 78 persen atau bertambah 8.643 hektar dibandingkan tahun 2024. Kenaikan ini merupakan lonjakan tertinggi dalam lima tahun terakhir. Kabupaten Rokan Hilir menjadi wilayah dengan kebakaran terluas pada 2025, yakni mencapai 12.128 hektar, bahkan lebih besar dibandingkan total luas kebakaran di seluruh kabupaten/kota di Riau pada tahun sebelumnya.

Tabel 8. Luas Karhutla di Riau Periode 2021 - 2025

KABUPATEN	TAHUN				
	2021	2022	2023	2024	2025
BENGKALIS	2.478	273	1.323	566	1.031
DUMAI	963	461	771	554	288
INDRAGIRI HILIR	407	11	1.005	1.019	255
INDRAGIRI HULU	91	394	1.800	2.222	155
KAMPAR	83	155	530	585	575
KEPULAUAN MERANTI	600	3	100	1.941	525
KOTA PEKANBARU	0	17	3	0	49
KUANTAN SINGINGI	0	45	126	255	207
PELALAWAN	2.157	657	676	1.982	1.028
ROKAN HILIR	1.686	2.079	721	1.130	12.128
ROKAN HULU	72	800	174	394	3.175

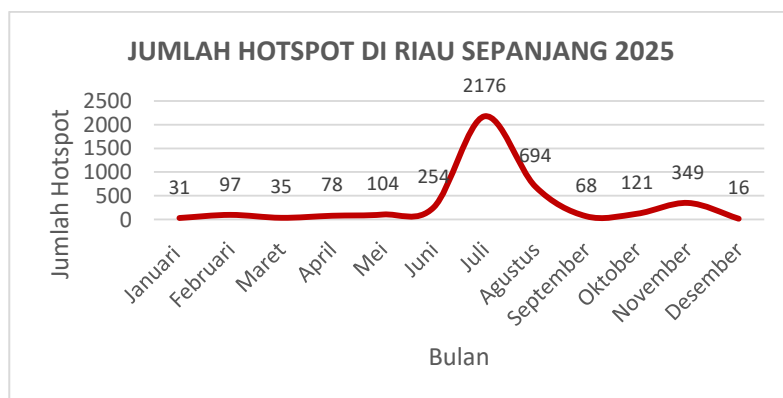


SIK	433	18	38	380	255
GRAND TOTAL	8.970	4.913	7.267	11.028	19.671

Sumber : SiPongi Kemenhut

Peningkatan luas kebakaran tersebut juga sejalan dengan lonjakan jumlah titik panas (*hotspot*) yang terpantau sepanjang 2025. Analisis Jikalahari menggunakan citra Suomi NPP-VIIRS (National Polar-orbiting Partnership-Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) mencatat terdapat sebanyak 4.023 *hotspot* di Provinsi Riau sepanjang 2025. Jumlah ini meningkat sangat signifikan dibandingkan tahun 2024 yang hanya mencatat 316 *hotspot*, atau mengalami kenaikan sebesar 1.173 persen (bertambah 3.707 titik).

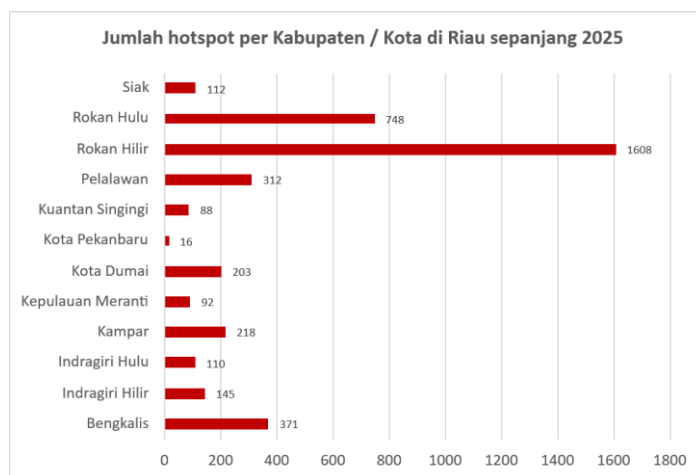
Grafik 3. Hotspot Riau Sepanjang 2025



Sumber: Olah Data Jikalahari (citra Suomi NPP-VIIRS)

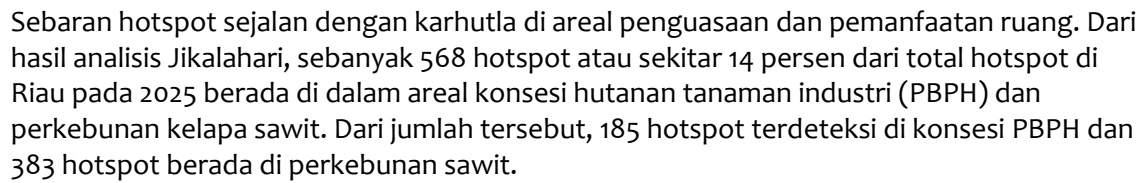
Hotspot terbanyak di Kabupaten Rokan Hilir dengan 1.608 titik, atau sekitar 40 persen dari total *hotspot* di Riau. Tingginya jumlah *hotspot* di wilayah ini berbanding lurus dengan luas lahan terbakar yang juga menjadi yang tertinggi pada 2025. Berdasarkan sebaran waktu, puncak kemunculan *hotspot* terjadi pada bulan Juli, dengan peningkatan hampir sembilan kali lipat dibandingkan bulan sebelumnya (Juni). Temuan ini juga konsisten dengan data *hotspot* Sipongi Kementerian Kehutanan yang mencatat sebanyak 4.038 *hotspot* di Provinsi Riau sepanjang 2025.

Grafik 4. Hotspot per Kabupaten/ Kota di Riau Sepanjang 2025



Sumber: Olah Data Jikalahari (Citra Suomi NPP-VIIRS)



[illegible]

Hotspot terbanyak di kawasan konsesi PBPH tercatat berada di areal PT Selaras Abadi Utama dengan 64 titik panas. Selain Korporasi tersebut, hotspot juga teridentifikasi di sejumlah konsesi kehutanan tanaman industri dan perkebunan kelapa sawit lainnya di Provinsi Riau. Tabel berikut menyajikan daftar Korporasi PBPH dan perkebunan sawit yang berada di wilayah konsesi dengan temuan hotspot sepanjang 2025.

GROUP / KORPORASI	JUMLAH HOTSPOT
APRIL	88
PT SELARAS ABADI UTAMA	64
PT RIAU ANDALAN PULP & PAPER	14
PT NUSA WANA RAYA	4
PT RIMBA PERANAP INDAH	3
PT NUSA PRIMA MANUNGGAL	1
PT NUSANTARA SENTOSA RAYA	1
PT SUMATERA RIANG LESTARI	1

APP	39
PT RUAS UTAMA JAYA	20
PT ARARA ABADI	8
PT PERAWANG SUKSES PERKASA	6
PT MUTIARA SABUK KHATULISTIWA	2
PT ARTELINDO WIRATAMA	1
PT SEKATO PRATAMA MAKMUR	1
PT SUNTARA GAJAPATI	1
UNKNOWN	58
PT DIAMOND RAYA TIMBER	58
GRAND TOTAL	185

Sumber: Olah Data Jikalahari 2025

Tabel 10. Hotspot di Konsesi PBPH Sepanjang 2025

KORPORASI	JUMLAH HOTSPOT
PT SABIRA NEGERIUTAMA	77
PT UNICO BIMASARI	37
PT PALMA SATU	31
PT PERKEBUNAN V	31
PT AGRO SARIMAS INDONESIA	24
PT KILAU KEMUNING	17
PT ALAM SARI LESTARI	15
PT TRISETYA USAHA MANDIRI	14
PT MURINI WOOD INDAH INDUSTRY	11
PT TRI BAKTI SARIMAS	10
PT ADEI CRUMB RUBBER	9
PT AGRO CITRA MULIA	9
PT TUMPUAN	9
PT AZEK SAKTI	5
PT BUDIDAKSA DWI KUSUMA	5
PT TORGANDA	5



PT BERTUAH ANEKA YASA	4
PT ROKAN ERA SUBUR	4
PT SAWIT ROKAN SEMESTA	4
PT KENCANA AMAL TANI	3
PT KHARISMA RIAU SENTOSA PRIMA	3
PT KOKONAKO INDONESIA	3
PT MEGANUSA INTISAWIT	3
PT RIAU SAKTI UNITED PLANTATIONS	3
PT SURYA DUMAI AGRINDO	3
PT TRI HASTA PALMA	3
PT ARINDO TRISEJAHTERA	2
PT BENGKALIS KAMPAR SARANA	2
PT GUNTUNG HASRAT MAKMUR	2
PT GUNUNG MAS RAYA	2
PT KARYABADI SAMASEJATI	2
PT PEPUTRA SUPRA JAYA	2
PT PERDANA INTI SAWIT	2
PT RIGUNAS AGRI UTAMA	2
PT TEGUH KARSAWANA LESTARI	2
PT TUNGGAL MITRA PLANTATION	2
PT UDAYA LOH JINAWI	2
PT AGRI PRIMA	1
PT ARIAN MULTI KAWA	1
PT ARVENA SEPAKAT	1
PT BINTANG RIAU SEJAHTERA	1
PT BUMI PALMA LESTARI PERSADA	1
PT INECDA	1
PT KEBUN PANTAI RAJA	1
PT MEKARSARI ALAM LESTARI	1
PT MITRA UNGGUL PUSAKA	1
PT NUSAESA BINA	1



PT PADASA ENAM UTAMA	1
PT PERMATA HIJAU SAWIT B	1
PT RAMAJAYA PRAMUKTI	1
PT RANTAU BAIS FAMILI	1
PT SARPINDOGRAHA SAWIT TANI	1
PT SINAR SAWIT SEJAHTERA	1
PT SINDORA SERAYA	1
PT SUBUR ARUM MAKMUR	1
PT TH INDO PLANTATIONS	1
GRAND TOTAL	383

Sumber: Olah Data Jikalauhari 2025

Data analisis hotspot dan citra satelit di atas juga sesuai temuan lapangan pada 17–27 Juli 2025, ditemukan karhutla di lima areal Korporasi, yakni PT Arara Abadi (Distrik Rokan Hilir), PT Riau Andalan Pulp and Paper Estate Pelalawan, PT Ruas Utama Jaya (Dumai), PT Perawang Sukses Perkasa Industri (Kampar Kiri), dan PT Selaras Abadi Utama (Pelalawan) seluas 179 hektar.³ Karhutla di 5 korporasi tersebut juga berdampak pada kondisi udara di Riau yang akibatkan ISPU mencapai level Sangat Tidak Sehat.

Selain di wilayah konsesi, hotspot juga teridentifikasi di kawasan konservasi dengan total 229 titik. Tiga kawasan konservasi dengan jumlah hotspot tertinggi adalah Hutan Lindung Bukit Suligi sebanyak 57 titik, Taman Nasional Tesso Nilo 46 titik, dan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling sebanyak 44 titik. Temuan ini menunjukkan bahwa kebakaran hutan dan lahan tidak hanya terjadi di wilayah pemanfaatan, tetapi juga telah merambah kawasan lindung dan konservasi, memperlihatkan lemahnya perlindungan kawasan bernilai ekologis tinggi serta pengawasan terhadap aktivitas di sekitarnya.

Tabel 11. Hotspot di Areal Konservasi Sepanjang 2025

NAMA KAWASAN	JUMLAH HOTSPOT
HL. BUKIT SULIGI	57
TN. TESSO NILLO	46
SM. BUKIT RIMBANG BUKIT BALING	44
HL. BUKIT BATABUH LUBUK JAMBI	31
HL. SUNGAI ROKAN	20
TN. BUKIT TIGAPULUH	13
SM. GIAM SIAK KECIL	10

³ <https://jikalauhari.or.id/kabar/rilis/jikalauhari-melaporkan-dugaan-tindak-pidana-karhutla-5-korporasi-di-riau/>

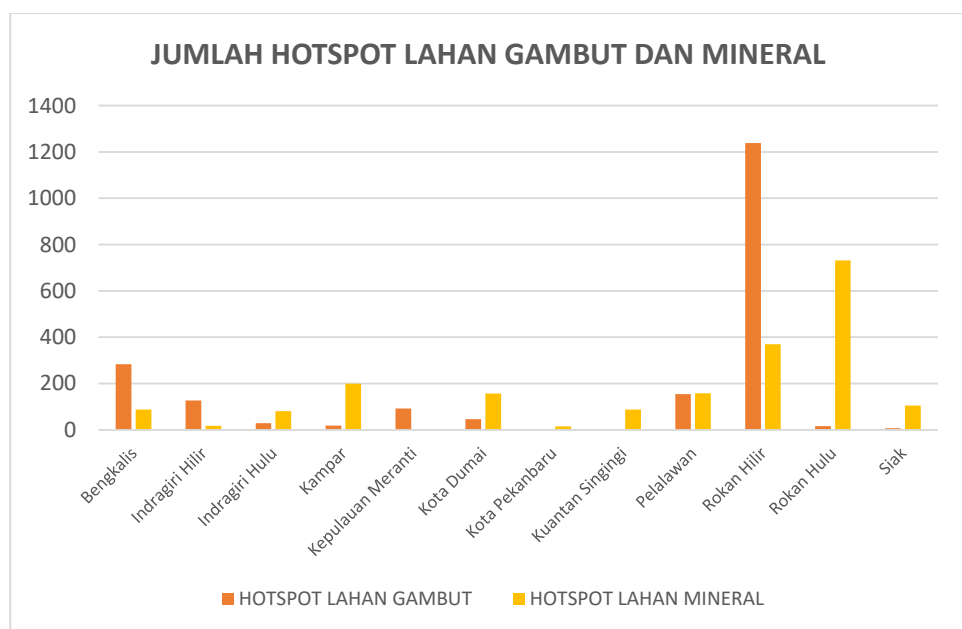


HL. BATANG ULAK I	4
TAHURA SUTAN SYARIF QASIM II	2
HL. BATANG ULAK II	1
HL. SUNGAI MAHATO	1
GRAND TOTAL	229

Sumber: Olah Data Jikalahari 2025

Sepanjang 2025, sebaran hotspot di Provinsi Riau menunjukkan bahwa hampir separuh titik panas berada di lahan gambut. Dasari total hotspot yang terdeteksi, sebanyak 2.012 titik berada di lahan gambut dan 2.011 titik berada di lahan mineral.

Grafik 5. Hotspot Lahan Gambut dan Mineral Provinsi Riau Sepanjang 2025



Sumber: Olah Data Jikalahari 2025

Tabel 12. Perbandingan Hotspot Lahan Gambut dan Mineral Provinsi Riau Sepanjang 2025

KABUPATEN	HOTSPOT LAHAN GAMBUT	HOTSPOT LAHAN MINERAL
Bengkalis	283	88
Indragiri Hilir	127	18
Indragiri Hulu	29	81
Kampar	19	199
Kepulauan Meranti	92	0
Kota Dumai	46	157



Kota Pekanbaru	1	15
Kuantan Singingi	0	88
Pelalawan	154	158
Rokan Hilir	1238	370
Rokan Hulu	16	732
Siak	7	105
GRAND TOTAL	2012	2011

Sumber: Olah Data Jikalahari 2025

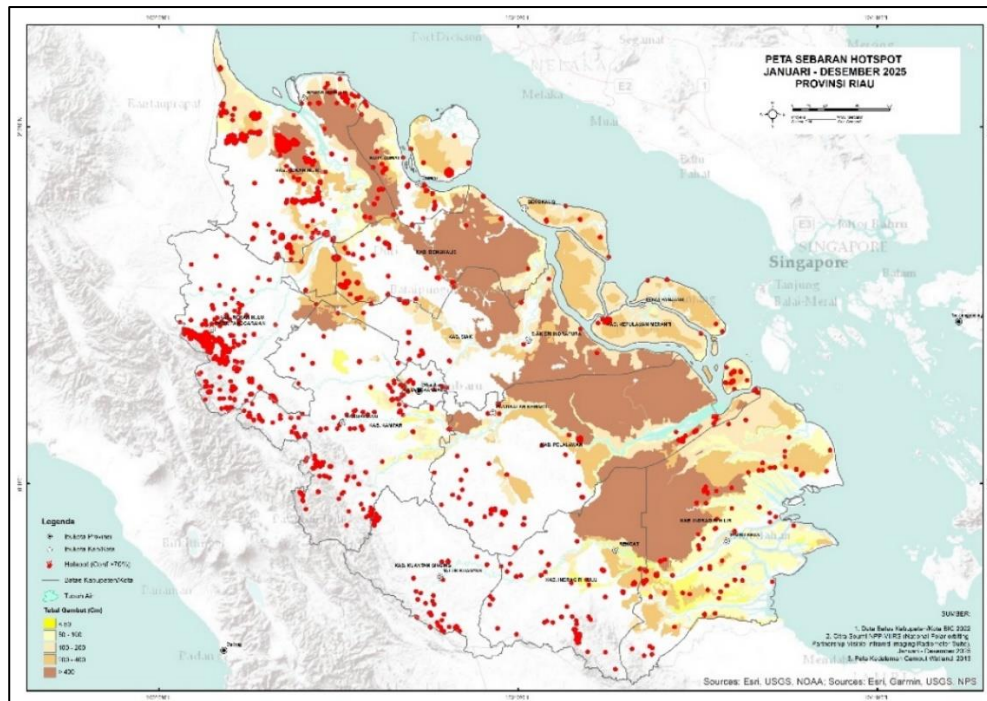
Hotspot di lahan gambut didominasi di areal gambut dalam, di mana sekitar 54 persen hotspot lahan gambut berada pada kedalaman lebih dari empat meter. Kabupaten Rokan Hilir menjadi wilayah dengan jumlah hotspot lahan gambut tertinggi, yakni mencapai 1.238 titik.

Tabel 13. Hotspot Lahan Gambut Berdasarkan Kedalaman Gambut di Riau 2025

KABUPATEN / KOTA	> 400	200 - 400	100 - 200	50 - 100	< 50	GRAND TOTAL
Bengkalis	7	158	111	7	0	283
Indragiri Hilir	19	40	16	33	19	127
Indragiri Hulu	0	27	0	1	1	29
Kampar	0	0	18	1	0	19
Kepulauan Meranti	0	80	11	1	0	92
Kota Dumai	16	13	4	13	0	46
Kota Pekanbaru	0	0	1	0	0	1
Pelalawan	109	18	23	4	0	154
Rokan Hilir	925	59	244	10	0	1238
Rokan Hulu	0	16	0	0	0	16
Siak	5	1	1	0	0	7
GRAND TOTAL	1081	412	429	70	20	2012



Gambar 5. Peta Sebaran Hotspot Lahan Gambut Riau Sepanjang 2025



Sumber: Olah Data Jikalauhari 2025

Temuan ini menegaskan bahwa hotspot di wilayah gambut dalam berkaitan dengan kondisi gambut yang sudah kering, karena secara alami gambut adalah material basah.

2. Banjir

Banjir menjadi salah satu bencana ekologis yang paling sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia sepanjang tahun 2025. Berdasarkan kompilasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dari total 3.086 kejadian bencana alam yang tercatat di Indonesia, banjir menyumbang 1.560 kejadian atau lebih dari separuh keseluruhan peristiwa bencana sepanjang tahun ini.⁴

Di Riau, Januari–Maret 2025, tercatat 43 kejadian banjir yang merendam 18 kecamatan di lima kabupaten, berdampak pada sekitar 7.000 kepala keluarga dan merendam 8.355 hektar lahan masyarakat.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau Kabupaten Kampar menjadi wilayah terdampak paling parah dengan 2.130 KK di 5 kecamatan dan 8 desa. Disusul Rokan Hulu dengan 610 KK. Genangan air setinggi dada orang dewasa juga mengakibatkan 60 santri di evakuasi dari pondok pesantren di Kampar.⁵


Memasuki akhir tahun 2025, banjir kembali melanda sejumlah wilayah di Riau meliputi Kabupaten Bengkalis, khususnya Kecamatan Bandar Laksamana, Siak Kecil, Bantan, dan Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu di kawasan sekitar aliran sungai, serta Kabupaten Indragiri Hulu, termasuk Desa Sungai Akar dan beberapa ruas jalan di lintas timur.⁶

⁴ <https://data.bnpb.go.id/>

⁵ <https://www.cakaplah.com/berita/baca/120918/2025/03/04/ribuan-kk-di-riau-terjadi-banjir-ketinggian-air-mencapai-15-meter#sthash.pKKpuQpo.vFOGnuwW.dpbs>

⁶ https://siakkab.go.id/Banjir_Simpang_Obor_Siak_Berstatus_Jalan_Nasional_Warga_Mengungsi251224040543





Selain itu, banjir terjadi di Kabupaten Siak pada 24 Desember 2025, yang merendam ruas jalan nasional dan memaksa 25 kepala keluarga mengungsi ke tenda darurat. Pemerintah Kabupaten Siak menjelaskan bahwa wilayah tersebut memang kerap terendam banjir setiap tahun akibat curah hujan tinggi, pasang air, serta luapan Danau Naga Sakti. Meski kanal-kanal telah dibersihkan, air dilaporkan tidak cepat surut sehingga pemerintah daerah menyiapkan tenda pengungsian dan layanan kesehatan bagi warga.⁷

Pada 8 Desember 2025, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mempublikasi 93 kecamatan dan 170 desa di Riau masuk kategori rawan banjir, sementara 23 kecamatan dan 36 desa berada di zona rawan longsor.⁸ Merespon himbauan BMKG, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi sejak 1 Desember 2025 hingga 31 Januari 2026.⁹ Pemerintah Provinsi Riau juga telah mengirimkan surat edaran kepada seluruh bupati dan wali kota, untuk melakukan pemetaan wilayah rawan, serta mendorong langkah kesiapsiagaan daerah.¹⁰ Namun hingga kini, kebijakan tersebut masih bersifat antisipatif dan belum menghentikan banjir yang terus berulang di wilayah-wilayah yang sama.

Temuan Jikalauhari menunjukkan, kerentanan banjir di Riau berkaitan erat dengan kerusakan ekosistem dan penguasaan ruang oleh konsesi industri. Di sepanjang Sungai Rokan terdapat 29 konsesi, Sungai Kampar 64 konsesi, Sungai Indragiri 34 konsesi, dan Sungai Siak 22 konsesi, yang didominasi konsesi PBPH dan perkebunan sawit. Keberadaan konsesi di sepanjang aliran sungai dan kawasan resapan air ini mengurangi daya serap alami dan memperbesar risiko banjir setiap musim hujan.

3. Longsor

Selain banjir, tanah longsor juga menjadi bagian dari rangkaian bencana yang melanda Indonesia pada tahun 2025. Berdasarkan data BNPB, tercatat sebanyak 224 kejadian tanah longsor di Indonesia selama periode 1 Januari hingga 14 Desember 2025.¹¹ Dampak terparah terjadi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Longsor yang disertai banjir bandang ini menimbulkan dampak kemanusiaan yang serius serta kerusakan infrastruktur dalam skala besar, terutama pada pekan terakhir November hingga awal Desember 2025.

Di Riau, bencana tanah longsor juga terjadi sepanjang tahun 2025. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kejadian longsor berdampak langsung pada aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat akibat rusaknya akses transportasi. Pada Februari 2025, longsor di Kabupaten Rokan Hulu memutus akses jalan lintas Riau–Sumatera Barat, tepatnya di ruas Jalan Lintas Ujung Batu–Rokan IV Koto.¹²

Longsor juga terjadi di Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu, pada Selasa, 23 Desember 2025. Longsor tersebut menimbun sejumlah truk pengangkut material dan alat berat ekskavator yang sedang beroperasi di lokasi akibat aktifitas penambangan galian C.¹³

⁷<https://infopublik.id/kategori/nusantara/952516/banjir-masih-melanda-sejumlah-wilayah-riau-bpbd-aktifkan-posko-siaga>

⁸ <https://mediacenter.riau.go.id/read/94435/206-desa-dan-116-kecamatan-di-riau-dipetakan-.html>

⁹ <https://mediacenter.riau.go.id/read/94303/resmi-ditetapkan-pemprov-riau-siaga-darurat-b.html>

¹⁰ https://www.instagram.com/p/DRhVKeJkrpq/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==

¹¹ <https://data.bnpb.go.id/>

¹² <https://rri.co.id/daerah/1354818/longsor-jalur-riau-sumbar-lintas-utara-putus>

¹³ <https://www.riauonline.co.id/kota-pekanbaru/read/2025/12/23/hutan-produksi-inhu-longsor-diduga-akibat-tambang-ilegal-truk-dan-alat-berat-tertimbun>



4. Konflik Masyarakat

Sepanjang tahun 2025, Jikalahari mencatat sedikitnya delapan konflik masyarakat dan korporasi yang terjadi di Provinsi Riau. Konflik ini dipicu oleh sengketa lahan, pengambilalihan wilayah kelola masyarakat, serta lemahnya mekanisme penyelesaian konflik lahan.

Pertama, konflik di Kabupaten Siak yang melibatkan masyarakat Kampung Tumang, Merempan Hulu, dan Lubuk Jering dengan PT Seraya Sumber Lestari (PT SSL). Pada 11 Juni 2025, aksi unjuk rasa warga di area operasional Korporasi berujung ricuh setelah diduga terjadi penebangan kebun sawit milik warga tanpa kesepakatan.¹⁴ Ketidakhadiran pihak Korporasi dalam upaya mediasi awal memicu kemarahan massa hingga berujung perusakan dan pembakaran fasilitas Korporasi. Pasca-kejadian, sebanyak 12 warga diproses hukum dan divonis hukuman penjara 1,5 hingga 3 tahun.¹⁵

Kedua, konflik di Kabupaten Kepulauan Meranti, antara warga dan PT Sumatera Riang Lestari (PT SRL). Konflik yang berlangsung lama ini kembali mencuat sepanjang 2025, ditandai dengan aksi penolakan warga dan pelaporan ke kepolisian atas dugaan perampasan lahan.¹⁶ Berdasarkan pendampingan Jikalahari, konflik dipicu oleh aktivitas Korporasi yang diduga mengerjakan lahan jauh dari permukiman terlebih dahulu sebelum masuk ke wilayah kelola masyarakat.

Ketiga, konflik di Desa Bangun Jaya, Rokan Hulu, pada 24 Juli 2025, ketika warga bernama Ratima Sihombing memprotes PT Merangkai Artha Nusantara (PT MAN) yang diduga menggunakan tanah miliknya sebagai akses jalan angkutan sawit tanpa izin dan tanpa ganti rugi. Meski memiliki dokumen kepemilikan sah, lahan tersebut dipakai sejak pembangunan pabrik dan menimbulkan dampak debu serta gangguan kenyamanan.¹⁷

Keempat, konflik di Kabupaten Kampar antara masyarakat Desa Siabu dan PT Ciliandra Perkasa pada 4 Agustus 2025. Ribuan warga menuntut pengembalian 20 persen lahan KKPA, pembayaran kompensasi Rp500 juta per bulan sesuai kesepakatan dengan Pemda Kampar, serta pengembalian lahan di luar HGU. Konflik ini menegaskan ketimpangan penguasaan lahan sawit dan lemahnya pemenuhan hak masyarakat adat yang telah berlangsung puluhan tahun.¹⁸

Kelima, konflik di Rokan Hilir pada Senin, 20 Oktober 2025, bentrokan terjadi antara kelompok masyarakat Wanton Siringoringo dan PT Ujung Tanjung Sejahtera (UTS) di Kecamatan Balai Jaya. Konflik ini berkaitan dengan sengketa pengelolaan perkebunan kelapa sawit Rumbia I dan II, bekas PT Gunung Mas Raya (Ivomas Group), yang kini dikelola PT UTS melalui kerja sama operasional dengan PT Agrinas Palma Nusantara. Bentrokan bermula ketika masyarakat memanen sawit secara sepihak dan dilarang oleh petugas keamanan Korporasi. Akibat kejadian tersebut, tujuh warga dan dua petugas keamanan Korporasi mengalami luka, serta 17 orang diamankan oleh kepolisian untuk dimintai

¹⁴ <https://riaubernas.com/news/detail/14370/masyarakat-3-kampung-demo-pt-ssl-berlangsung-ricuh-massa-bakar-mobil-kantor-dan-mes>

¹⁵ <https://jejakkeadilan.com/2025/10/16/fakta-persidangan-konflik-warga-tumang-dan-pt-ssl-samuel-akui-tak-kenal-paulina/>

¹⁶ <https://mongabay.co.id/2025/08/13/konflik-warga-rangsang-dengan-Korporasi-kayu-berujung-laporan-ke-polisi/>

¹⁷ <https://suaramassa.co.id/warga-bangun-jaya-protes-pt-man-gunakan-tanah-pribadi-untuk-akses-jalan-tanpa-izin/>

¹⁸ <https://riausky.com/news/detail/82356/warga-tanjung-simpang-dan-pt-thip-capai-kesepakatan>



keterangan. Situasi kemudian dinyatakan kondusif setelah pengamanan oleh Polri dan TNI, dan kedua pihak difasilitasi untuk berdamai, meskipun proses hukum masih berjalan.¹⁹

Keenam konflik di Kabupaten Indragiri Hulu, adanya ketidakjelasan batas dan status lahan eks HGU PT Alam Sari Lestari yang kini dikelola PT Sinar Belilas Perkasa (SBP) sehingga memicu banyak klaim tumpang tindih dan keresahan warga Desa Sungai Raya dan Kelurahan Sekip Hilir. Warga bersama Korporasi mendesak pengukuran ulang HGU oleh ATR/BPN sebagai langkah pencegahan konflik, menandai kegagalan negara memastikan kepastian hukum atas tanah pasca-berakhirnya izin²⁰.

Ketujuh, konflik di Kabupaten Bengkalis, pengelolaan lahan perkebunan sawit melalui skema kerja sama operasi (KSO) juga memicu bentrokan antar kelompok. Pada Senin, 22 Desember 2025, bentrokan terjadi antara pekerja PT PAB dan eks karyawan PT SIS di area perkebunan seluas sekitar 700 hektare yang dikelola PT PAB melalui KSO dengan PT APN. Bentrokan bermula ketika sekitar 45 orang pekerja PT PAB mendatangi lokasi perkebunan, dan berujung pada kekerasan fisik. Akibat insiden tersebut, dua orang mengalami luka berat dan 11 kendaraan dilaporkan rusak. Aparat kepolisian dan TNI turun ke lokasi untuk mengendalikan situasi, sementara pemerintah desa meminta penanganan serius agar konflik serupa tidak kembali terjadi.²¹

5. Keanekaragaman Hayati

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), keanekaragaman hayati di Pulau Sumatera menghadapi sedikitnya tujuh ancaman utama. Ancaman tersebut meliputi perubahan tata guna lahan yang memicu fragmentasi habitat, kebakaran hutan, perburuan satwa liar, penangkapan ikan berlebihan, serta dampak perubahan iklim yang memengaruhi siklus hidup satwa.²²

Di Riau, perusakan keanekaragaman hayati sebagai habitat satwa terjadi akibat terbitnya perizinan sektor PBPH dan perkebunan sawit. Pada 13 Maret 2025, seorang pekerja perkebunan di Kabupaten Pelalawan tewas diterkam Harimau Sumatera²³. Lalu di Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti, seekor Harimau Sumatera memangsa sapi milik warga pada 30 Juni 2025.²⁴

Selain serangan harimau, serangan gajah liar juga terjadi pada 20 Oktober 2025 terhadap sebuah keluarga di Kota Pekanbaru. Seekor gajah dari kawasan Petapahan memasuki area permukiman warga yang merupakan bagian dari wilayah jelajah alaminya. Dalam peristiwa tersebut, seorang anak perempuan berusia delapan tahun mengalami luka dan harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit²⁵

¹⁹ <https://regional.kompas.com/read/2025/10/22/174431578/bentrokan-berdarah-di-rokan-hilir-gara-gara-kebun-sawit-warga-lapor-polsek>

²⁰ https://riau.harianhaluan.com/daerah/1115987575/masyarakat-dan-pt-sbp-desak-bpn-ukur-ulang-lahan-hgu-eks-pt-alam-sari-lestari#google_vignette

²¹ <https://news.detik.com/melindungi-tuah-marwah/d-8274561/kso-sawit-di-bengkalis-berujung-bentrok-kades-jangan-warga-yang-jadi-korban>

²² <https://lestari.kompas.com/read/2025/08/20/101700686/bappenas-keanekaragaman-hayati-di-sumatera-terancam-perkebunan-sulawesi>

²³ <https://www.goriau.com/berita/baca/diserang-Sga-harimau-di-hutan-inhu-petani-damar-selamat-setelahSnju-anak-harimau-hingga-terpental.html>

²⁴ <https://www.cakaplah.com/berita/baca/125036/2025/07/03/harimau-sampale-mangsa-ternak-warga-di-pelalawan-bbksda-riau-pasang-perangkap#sthash.KuEMCoYN.dpbs>

²⁵ <https://sebalik.com/detail/46438/bbksda-riau-ungkap-lokasi-keluarga-diserang-gajah-masuk-jalur-jelajah-satwa-liar>



Krisis keanekaragaman hayati juga terjadi di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Pada 10 September 2025 tercatat kematian satu ekor gajah akibat keracunan, jerat pemburu, dan penyakit. Pada 1 Desember 2025, tepatnya di bagian tenggara kawasan (Tesso Tenggara), Seekor anak gajah Sumatera betina berusia sekitar dua tahun mengalami luka serius di kaki kanan depan akibat jerat tali nilon di sekitar areal konsesi PBPH di Provinsi Riau.²⁶

Tekanan terhadap TNTN tidak terlepas dari perubahan tutupan lahan di dalam kawasan konservasi. Pihak pengelola menyampaikan bahwa lebih dari 40.000 hektar kawasan hutan TNTN telah berubah menjadi kebun sawit ilegal dan permukiman liar. Kondisi ini berdampak pada menyempitnya ruang jelajah satwa, meningkatnya risiko konflik, serta kematian satwa liar. Hingga akhir 2025, luas kawasan TNTN dilaporkan tersisa kurang dari 15 persen dibandingkan kondisi awal penetapannya sebagai taman nasional.²⁷

Dalam konteks penataan ruang dan penguasaan lahan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan bahwa hingga Desember 2025 pemerintah pusat telah membatalkan 1.040 Sertifikat Hak Milik (SHM) warga di dalam kawasan TNTN, Kabupaten Pelalawan, karena berada di wilayah konservasi dan harus dikembalikan ke fungsi hutan. Pembatalan sertifikat dilakukan sebagai bagian dari penertiban administrasi pertanahan, sementara alih fungsi kebun sawit menjadi hutan lindung menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan. Langkah ini diklaim sebagai upaya pemulihan TNTN sebagai habitat gajah Sumatera dan ekosistem alaminya di tengah konflik lahan yang berlangsung.²⁸

6. Ruang Kelola Masyarakat

Berdasarkan data Menteri Kehutanan capaian Perhutanan Sosial (PS) telah mencapai 8,32 juta hektare lahan yang dikelola oleh masyarakat melalui lebih dari 11.000 SK yang melibatkan 1,4 juta kepala keluarga dan membentuk 15.925 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).²⁹ Realisasi Perhutanan Sosial (PS) di Riau sendiri baru mencapai 14% atau 178.173,87 hektar yang melibatkan 32.341 keluarga melalui 186 Surat Keputusan.³⁰ Angka tersebut masih jauh tertinggal dari target awal seluas 1,3 juta hektar.

Selain Perhutanan Sosial, Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) juga menjadi instrumen penting dalam penataan ruang dan penyelesaian konflik agraria. Hingga Oktober 2025, pemerintah melaporkan realisasi TORA nasional mencapai 3,04 juta hektare atau sekitar 70 persen dari target RPJMN.³¹ Di Provinsi Riau, Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencatat telah menerbitkan 78.172 bidang hasil redistribusi tanah, termasuk 3.150 bidang di Kabupaten Siak, Pelalawan, dan Kampar. Namun, pelaksanaan TORA masih menghadapi kendala serius, mulai dari pemenuhan target minimal 20 persen, persoalan tanah transmigrasi, bidang tanah di kawasan hutan, konflik pertanahan, hingga belum tuntasnya pengakuan tanah ulayat.³²

²⁶ <https://www.cakaplah.com/berita/baca/130826/2025/12/11/anak-gajah-sumatera-luka-serius-terkena-jerat-di-area-konsesi-Korporasi#sthash.QdWxb5AF.dpbs>

²⁷ <https://mediacenter.riau.go.id/read/92120/krisis-gajah-tesso-nilo-bbksda-riau-ungkap-23.html>

²⁸ <https://www.detik.com/properti/berita/d-8244517/nusron-batalkan-1-040-shm-warga-tesso-nilo-agar-kembali-menjadi-hutan>

²⁹ <https://www.kehutan.go.id/pers/arScle-85>

³⁰ <https://gokups.menlhk.go.id/>

³¹ <https://www.kabarcsr.com/hutan/2181709390/kemenhut-klaim-reforma-agraria-berhasil-304-juta-hektartora-terealisasi-dan-turunkan-konflik-agraria>

³² <https://kab-siak.atrbpn.go.id/berita%20kantore%20pertanahan/rapat-koordinasi-akhir-gtra-provinsi-riau-tahun-2025>



7. Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan menjadi salah satu persoalan yang terus terjadi di Riau, baik dari pengelolaan limbah domestik yang buruk maupun aktivitas industri skala besar. Selain pencemaran darat, Riau juga menghadapi ancaman pencemaran udara berkepanjangan akibat karhutla.

Selain itu, pencemaran air akibat aktivitas korporasi juga terus terjadi di sejumlah wilayah. Pada Mei 2025, terjadi dugaan pencemaran Sungai Singingi di Kabupaten Kuantan Singingi yang diduga berasal dari limbah air cucian Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Sinergi Inti Makmur. Limbah tersebut dialirkan langsung ke sungai tanpa pengolahan yang memadai dan berdampak pada kematian ikan serta penurunan kualitas ekosistem sungai yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.³³

Lalu pada November 2025 di Sungai Lanjung, Kabupaten Siak pencemaran diduga dipicu oleh pembangunan kanal PKS PT Karina Ersada Sejahtera yang menyebabkan air sungai menjadi keruh dan berbau. Kondisi ini mengganggu aktivitas warga, mengancam kesehatan, serta menghilangkan sumber air bersih dan mata pencaharian masyarakat sekitar.³⁴

Terbaru, di Kabupaten Pelalawan, ratusan ikan ditemukan mati mendadak di Sungai Kampar, Desa Sering. Diduga pencemaran limbah berbahaya berasal dari aktivitas industri besar di wilayah tersebut, termasuk PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Peristiwa ini kembali menegaskan lemahnya pengawasan dan kepatuhan Korporasi terhadap ketentuan pengelolaan limbah, yang berujung pada rusaknya ekosistem perairan dan terganggunya mata pencaharian nelayan lokal.³⁵

8. Kecelakaan Kerja

Sepanjang tahun 2025, Jikalahari mencatat sedikitnya lima peristiwa kecelakaan kerja yang terjadi di Provinsi Riau. Rangkaian kecelakaan tersebut mengakibatkan 19 orang meninggal dunia, termasuk pekerja dan masyarakat di sekitar wilayah operasi industri. Peristiwa kecelakaan kerja ini terjadi di sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan pemanfaatan sumber daya alam, seperti kehutanan, industri pengolahan, migas, dan transportasi hasil produksi.

Pada Februari 2025, kecelakaan kerja terjadi di area konsesi PT Nusa Wana Raya (APRIL Group).³⁶ Mobil bak terbuka jenis Colt Diesel yang mengangkut pekerja PT Empat Res Bersaudara (ERB) beserta anggota keluarganya terjun ke Sungai Segati. Peristiwa ini mengakibatkan 14 orang, termasuk tujuh anak-anak, dan satu orang dinyatakan hilang. Kendaraan tersebut diketahui tidak diperuntukkan sebagai angkutan penumpang dan melanggar ketentuan keselamatan kerja.

Lalu pada 18 Maret 2025, sekitar pukul 01.31 WIB. Sebuah truk tronton bermuatan kayu balak milik PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dengan nomor polisi BM 8890 JO menabrak seorang anak berusia sekitar tujuh tahun di Simpang Empat Lampu Merah, Desa

³³ <https://www.cakaplah.com/berita/baca/123782/2025/05/27/sungai-singingi-tercemar-limbah-pks-klhk-diminta-turun-tangan#sthash.RQ7KDXGh.dpbs>

³⁴ <https://www.riauonline.co.id/siak/read/2025/11/04/air-sungai-lanjung-siak-tercemar-pembangunan-pks-anak-anak-tak-bisa-sekolah>

³⁵ <https://www.ranahriau.com/berita-25946-ratusan-ikan-mati-mendadak-di-sungai-kampar-ketua-umum-kmpks-meledak-rapp-harus-tanggung-jawab.html>

³⁶ <https://jikalahari.or.id/kabar/rilis/april-grup-harus-bertanggung-jawab-tragedi-menelan-korban-jiwa-akibat-abai-regulasi-dan-ham/>



Sawah, Kecamatan Kuantan Tengah. Korban, yang merupakan warga pendatang asal Sumatera Barat dan tinggal di Dusun Tobek Panjang, meninggal dunia di tempat kejadian dan selanjutnya dievakuasi ke RSUD Teluk Kuantan.³⁷

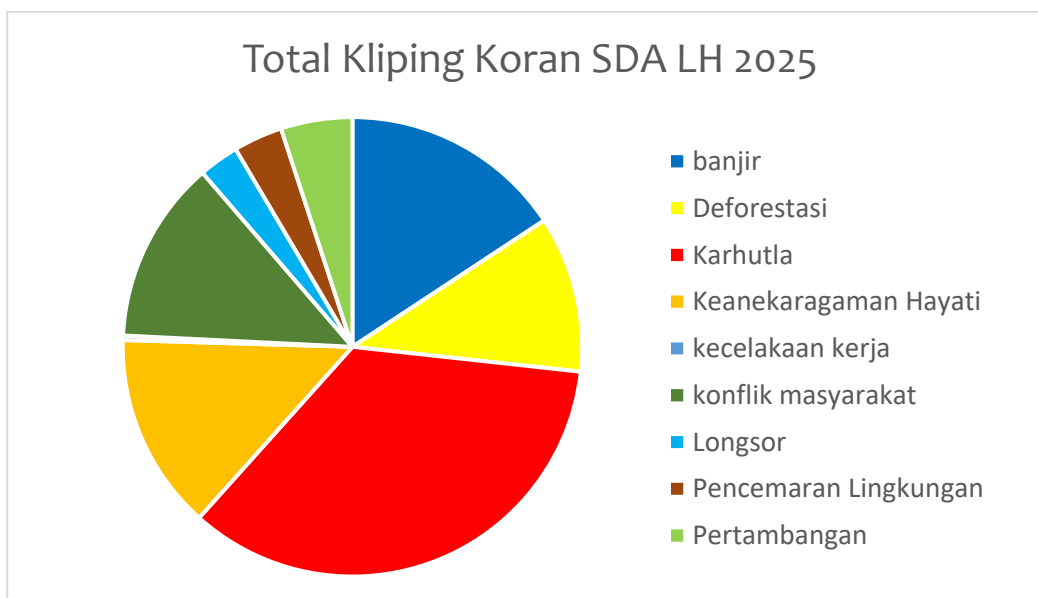
Kecelakaan kerja juga terjadi di PT Asia Pacific Rayon (APR) pada Juni 2025. Kejadian ini menyebabkan seorang pekerja meninggal dunia akibat benturan keras di area *spinning* pabrik.³⁸ Sementara itu, pada April 2025, dua anak ditemukan meninggal dunia akibat tenggelam di kolam bekas pengeboran minyak milik PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) di Rantau Kopar, Kabupaten Rokan Hilir.³⁹ Pada November 2025, seorang pekerja mitra PHR kembali meninggal dunia akibat tertimpa menara rig yang ambruk di Duri Field, Kabupaten Bengkalis.

9. Kliping Media terhadap Persoalan SDA–LH di Riau

Sepanjang 2025, kliping media koran Riau Pos dan Tribun Pekanbaru yang dikompilasi Jikalahari mencatat sebanyak 318 pemberitaan terkait persoalan sumber daya alam dan lingkungan hidup (SDA-LH) di Provinsi Riau. Dari jumlah tersebut, isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi tema yang paling banyak diberitakan dengan total 111 berita. Isu banjir menempati urutan kedua dengan 50 berita, disusul keanekaragaman hayati sebanyak 44 berita dan konflik masyarakat sebanyak 41 berita.

Selanjutnya, isu deforestasi tercatat dalam 35 pemberitaan, pertambangan sebanyak 16 berita, pencemaran lingkungan 11 berita, longsor 9 berita, serta kecelakaan kerja 1 berita. Data kliping ini menunjukkan distribusi isu ekologis yang menjadi perhatian media sepanjang 2025, dengan karhutla, banjir, dan keanekaragaman hayati sebagai tiga tema paling dominan dalam pemberitaan SDA-LH di Provinsi Riau.

Grafik 6. Pemberitaan Media terhadap Permasalahan SDA–Lingkungan Hidup di Riau Sepanjang 2025



Sumber: Olah Data Jikalahari 2025

³⁷ <https://www.bualbual.com/2025/03/18/diduga-ditabrak-truk-rapp-bocah-7-tahun-meninggal-dunia-di-tempat>

³⁸ <https://regional.kompas.com/read/2025/04/24/133641978/balita-kakak-adik-tewas-tenggelam-di-kolam-bekas-bor-minyak-pertamina-di>

³⁹ <https://regional.kompas.com/read/2025/04/24/133641978/balita-kakak-adik-tewas-tenggelam-di-kolam-bekas-bor-minyak-pertamina-di>



10. Inisiatif Masyarakat Sipil

Sepanjang 2025, Jikalahari aktif terlibat dalam merespons berbagai persoalan SDA-LH yang terus berulang. Inisiatif tersebut muncul dalam beragam bentuk, mulai dari telaah kebijakan, advokasi hukum, pemantauan lapangan, penyusunan kajian, hingga penguatan kolaborasi lintas sektor.

a. Menelaah Peluang Perbaikan Tata Kelola Hutan dan Lahan Pasca Perpres No. 5 Tahun 2025

Pada 6 Februari 2025 di Jakarta, Senarai, Jikalahari, WALHI Riau, dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menyelenggarakan konferensi pers bertajuk *“Menelaah Peluang Perbaikan Tata Kelola Hutan dan Lahan Pasca Perpres No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan”*. Kegiatan ini dilakukan untuk mendiskusikan substansi Perpres No. 5 Tahun 2025 sekaligus mendiseminasikan temuan masyarakat sipil terkait penyelesaian kegiatan usaha di dalam kawasan hutan. Telaah ini menyoroti implikasi kebijakan penertiban kawasan hutan terhadap praktik perizinan, kepastian hukum, serta potensi pemulihan kawasan hutan yang selama ini dibebani aktivitas usaha.

b. Diskusi Publik Menyambut Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Terpilih 2024–2029

Pada 19 Februari 2025, Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan mahasiswa menyelenggarakan diskusi publik di Gedung Dekanat FISIP Universitas Riau dengan tajuk *“Ruang Ekologis Riau Semakin Rusak, Rekomendasi Pemulihan Ekologis untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 2024–2029”*. Diskusi ini diinisiasi oleh Jikalahari, WALHI Riau, FITRA Riau, Perkumpulan Elang, Mapala Universitas Riau, akademisi FISIP Unri, serta perwakilan masyarakat. Kegiatan tersebut bertujuan merumuskan rekomendasi kebijakan lingkungan yang disusun dalam bentuk *policy brief* dan disampaikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Riau terpilih menjelang pelantikan pada 20 Februari 2025.


c. Laporan Pemantauan Koalisi 11 Provinsi atas Aktivitas Korporasi Pulp and Paper

Jikalahari bersama jaringan organisasi masyarakat sipil di 11 provinsi menyusun dan menyerahkan laporan hasil pemantauan atas kerusakan hutan dan konflik agraria yang berkaitan dengan aktivitas korporasi hutan tanaman industri (PBPH). Laporan tersebut disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Dr. Mahfudz, dalam audiensi koalisi ke Kementerian Kehutanan RI. Koalisi yang terlibat antara lain WALHI Riau, WALHI Jambi, KSPPM Prapat (Sumatera Utara), Yayasan Citra Mentawai Mandiri (Sumatera Barat), WALHI Sumatera Selatan, WALHI Bangka Belitung, WALHI Kalimantan Tengah, WALHI Kalimantan Timur, WALHI Kalimantan Barat, Point Kalbar, Green of Borneo Kalimantan Utara, dan WALHI Papua. Hasil pemantauan menunjukkan masih adanya kebakaran di areal korporasi dengan indikasi kesengajaan, penebangan hutan alam, pembukaan gambut, serta konflik sosial yang belum terselesaikan antara Korporasi PBPH dan masyarakat adat maupun masyarakat tempatan.

d. Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Karhutla oleh Lima Korporasi PBPH di Riau

Pada 4 Agustus 2025, Jikalahari melaporkan dugaan tindak pidana lingkungan hidup berupa pencemaran udara dan terlampauinya baku kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di dalam izin lima korporasi hutan tanaman industri di Riau. Kelima korporasi tersebut adalah PT Arara Abadi (Distrik Rokan Hilir), PT Riau Andalan Pulp and Paper (Estate Pelalawan), PT Ruas Utama Jaya (Dumai), PT Perawang Sukses Perkasa Industri (Kampar Kiri), dan PT Selaras Abadi Utama (Pelalawan). Temuan Jikalahari menunjukkan kebakaran terjadi di dalam areal izin





Korporasi, berdekatan dengan tanaman akasia, disertai keberadaan kanal, tanaman akasia dan sawit berusia 3–5 tahun, serta sebagian besar berada di kawasan gambut, termasuk areal prioritas restorasi. Selain itu, ditemukan tegakan hutan alam yang ikut terbakar dan tidak terlihat keberadaan menara pemantau api di sekitar lokasi kebakaran.

e. Pernyataan Sikap Koalisi Masyarakat Sipil Riau “Bebaskan Khariq Anhar”

Pada 3 September 2025, Koalisi Masyarakat Sipil Riau menyampaikan pernyataan sikap bertajuk “*Bebaskan Khariq Anhar*” sebagai respons atas tindakan represif aparat penegak hukum terhadap aksi penyampaian pendapat publik yang berlangsung pada 25 Agustus hingga 1 September 2025 di sejumlah wilayah Indonesia. Koalisi mengecam penggunaan kekerasan dan penangkapan secara serampangan, termasuk kriminalisasi terhadap mahasiswa Universitas Riau, Khariq Anhar. Koalisi menilai proses penangkapan yang dilakukan Polda Metro Jaya tidak sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan berpotensi mengancam kebebasan berekspresi serta partisipasi publik dalam isu kebijakan.

f. Mendorong Tata Kelola Ekosistem Inklusif melalui Inisiatif Bengkalis Lestari

Pada 28 November 2025, Jikalahari bersama jaringan organisasi non-pemerintah di Provinsi Riau menghadiri peluncuran Program Bengkalis Lestari yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada 26 November 2025. Program ini dirancang sebagai ruang kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat sipil, akademisi, komunitas, dan desa untuk memperkuat upaya penyelamatan ekosistem dan pembangunan ekonomi ramah lingkungan. Dengan mengusung tema “*Menyelamatkan Ekosistem, Memperkuat Masyarakat*”, Bengkalis Lestari diposisikan sebagai model tata kelola lingkungan yang inklusif, sebagaimana disampaikan oleh Bupati Bengkalis, Kasmarni.

g. Penguatan Kolaborasi Jikalahari dan FMIPA Universitas Riau

Pada 1 Desember 2025, Jikalahari dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Riau melakukan pertemuan untuk membahas keberlanjutan kerja sama kelembagaan. Pertemuan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan Jikalahari serta dosen dan sivitas akademika FMIPA Unri. Kedua pihak sepakat bahwa kolaborasi yang dibangun tidak hanya berfokus pada penguatan kapasitas mahasiswa, tetapi juga pada sinergi riset, edukasi, dan advokasi lingkungan yang berbasis pengetahuan ilmiah.


h. Publikasi Kajian Perampasan Aset Surya Darmadi

Pada 4 November 2025 di Jakarta Barat, Jikalahari bekerja sama dengan ICEL menyelenggarakan publikasi kajian tentang perampasan aset Surya Darmadi. Kajian ini mengulas proses penghentian kejahatan korporasi yang berlangsung lebih dari 15 tahun melalui kewenangan perampasan aset oleh Kejaksaan Agung. Selain itu, kajian ini mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset serta mendorong penegakan hukum terhadap korporasi sawit ilegal lain di dalam kawasan hutan.

i. Kajian Keterbukaan Informasi Publik di Sektor Hutan Tanaman Industri

Jikalahari juga mempublikasikan kajian mengenai keterbukaan informasi publik di sektor hutan tanaman industri (PBPH). Kajian ini menegaskan bahwa ketertutupan informasi perizinan dan peta konsesi menjadi salah satu faktor yang melemahkan tata kelola kehutanan dan pengawasan publik. Temuan lapangan menunjukkan keterbatasan akses informasi berkontribusi pada deforestasi, konflik sosial, serta





rendahnya akuntabilitas lingkungan. Kajian ini juga menggarisbawahi ketidaksinkronan regulasi nasional dengan standar internasional seperti *European Union Deforestation Regulation* (EUDR) dan *Lacey Act*, serta menekankan pentingnya harmonisasi regulasi dan penguatan peran Komisi Informasi.

j. Peduli Pasca Bencana Sumatra

Pada 13–14 Desember 2025, Jikalahari melakukan respon kemanusiaan pascabencana di Nagari Malalo melalui penyaluran bantuan kebutuhan dasar dan dukungan infrastruktur air bersih. Bantuan yang disalurkan berupa makanan dan sembako, termasuk makanan ringan dan buah-buahan, serta pipa PPE untuk mendukung penyaluran air bersih bagi masyarakat terdampak.

Selain bantuan logistik, Jikalahari juga melaksanakan kegiatan trauma healing bagi anak-anak melalui aktivitas bercerita, menggambar, dan bermain bersama relawan. Untuk memastikan keberlanjutan akses air bersih, tim Jikalahari bersama masyarakat setempat melakukan pengecekan lokasi sumber galodo guna memetakan jalur pemasangan pipa agar lebih aman dan meminimalkan risiko kerusakan di kemudian hari



Setelah Bencana Ekologis Sumatera,
Menata Ulang Tata Ruang & Cabut Izin Korporasi di DAS

BAGIAN III:

KEBIJAKAN NASIONAL DAN DAERAH SEKTOR SDA-LH SEPANJANG 2025



KEBIJAKAN NASIONAL DAN DAERAH SEKTOR SDA-LH SEPANJANG TAHUN 2025

Bagian ini akan mengulas kebijakan politik nasional dan daerah di sektor SDA-LH sepanjang 2025. Fokus pembahasan tentang kebijakan, dan instrumen administratif—mulai dari peraturan presiden, kebijakan kementerian, hingga keputusan dan surat edaran—yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah.

1. Kebijakan Pemerintah Pusat

Sepanjang 2025, Jikalauhari menemukan 8 kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, mulai dari peraturan presiden, peraturan pemerintah, hingga kebijakan teknis kementerian dan lembaga terkait SDA-LH.

a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove.

Peraturan ini mengatur perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove sebagai satu kesatuan ekologi yang saling terkait dalam menjaga keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan. PP ini menetapkan bahwa upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove dilakukan baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan sebagai dasar pengendalian pemanfaatan dan perlindungan kawasan mangrove secara nasional.⁴⁰

b. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan ini mengatur kerangka perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan melalui tahapan inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion, serta penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Kebijakan ini menjadi dasar perencanaan pemanfaatan ruang dan sumber daya alam agar selaras dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.⁴¹

c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2021 tentang penerapan sanksi administratif dan PNBP.

Peraturan ini merevisi aturan sebelumnya. Salah satu yang menjadi perhatian dan menimbulkan kekhawatiran adalah kewenangan satgas Penertiban Kawasan Hutan yang mengambil alih kewenangan kementerian kehutanan. Berdasarkan pasal 6 ayat 1 PP Nomor 45 Tahun 2025, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mendapat kewenangan untuk melakukan inventarisasi data dan informasi kegiatan usaha yang terbangun dalam kawasan hutan bersama Menteri Kehutanan. Sebelumnya, kewenangan ini hanya berada di kendali Menteri Kehutanan.

d. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan

Perpres ini bertujuan menertibkan pengelolaan hutan yang tidak optimal, terutama perkebunan ilegal, melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) yang melibatkan unsur militeristik (Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kapolri) dan penegak hukum (Jaksa

⁴⁰ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/320198/pp-no-27-tahun-2025>

⁴¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/320194/pp-no-26-tahun-2025>



Agung) untuk mengambil alih lahan, namun kebijakan ini menuai kritik karena kekhawatiran dampak pada masyarakat adat dan ruang hidup mereka.⁴²

e. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan

Permen ini fokus pada penyesuaian aturan perencanaan, perubahan peruntukan, perubahan fungsi, dan penggunaan kawasan hutan, terutama untuk mengatasi masalah perkebunan sawit ilegal dan memberikan kepastian hukum, dengan mengubah ketentuan teknis agar lebih adaptif dan menyelesaikan isu pengelolaan hutan.⁴³ Terbitnya permen ini akan menguntungkan para pelaku usaha yang telah membangun kebun di kawasan hutan, karena permen ini membolehkan pelepasan kawasan hutan, meskipun bukan di areal kawasan hutan yang dapat dikonversi (HPK).

f. Peraturan Menteri LH/BPLH Nomor 11 Tahun 2025 tentang Baku Mutu Air Limbah dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah untuk Air Limbah Domestik

Pemerintah pusat memperbaiki kebijakan pengendalian pencemaran melalui penerbitan Peraturan Menteri LH/BPLH Nomor 11 Tahun 2025 tentang pengelolaan air limbah domestik. Permen ini menggantikan Permen LHK Nomor 68 Tahun 2016 dan sebagian Permen LHK Nomor 19 Tahun 2010, dengan sejumlah pengetatan, seperti pemisahan jenis air limbah kakus dan non-kakus, penambahan parameter kualitas air, kewajiban teknologi pengolahan sesuai volume limbah, serta penyesuaian mekanisme perizinan dan persetujuan teknis. Kebijakan ini diposisikan sebagai instrumen untuk menekan pencemaran air akibat limbah domestik yang selama ini menjadi persoalan di kawasan perkotaan.⁴⁴

g. Peraturan Menteri LH/BPLH Nomor 7 Tahun 2025 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Korporasi (PROPER)

Pemerintah pusat memperbaiki instrumen pengawasan kinerja lingkungan korporasi melalui penerbitan Peraturan Menteri LH/BPLH Nomor 7 Tahun 2025 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Korporasi (PROPER). Regulasi ini menaikkan ambang penilaian (*passing grade*) untuk peringkat Hijau dan Emas, sehingga Korporasi tidak cukup hanya memenuhi standar kepatuhan minimum. Melalui kebijakan ini, pemerintah mendorong industri untuk melakukan inovasi nyata dalam pengurangan emisi, pengelolaan limbah, dan peningkatan kinerja lingkungan secara berkelanjutan sebagai bagian dari tanggung jawab korporasi.

h. Peraturan BMKG Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Modifikasi Cuaca

Peraturan BMKG ini mengatur mengenai penyelenggaraan modifikasi cuaca dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Modifikasi Cuaca adalah usaha campur tangan manusia dalam merekayasa pengendalian sumber daya air di atmosfer dengan memanfaatkan parameter iklim dan cuaca.⁴⁵

⁴² <https://paralegal.id/peraturan/peraturan-presiden-nomor-5-tahun-2025/>

⁴³ https://jdih.kehutan.go.id/new2/home/portfolioDetails3/PERMENHUT_20_2025.pdf/20/2025/5/1309

⁴⁴ <https://toyaindonesia.com/article/peraturan-menteri-lingkungan-hidup-no-11-tahun-2025-apa-perbedaan-dengan-peraturan-sebelumnya>

⁴⁵ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/315530/peraturan-bmkg-no-2-tahun-2025>



i. **Peraturan BNPB Nomor 1 Tahun 2025 : Menetapkan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) Tahun 2025-2029**

Pemerintah pusat menetapkan Peraturan BNPB Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) 2025–2029 sebagai landasan kebijakan penanggulangan bencana secara nasional. Regulasi ini menegaskan arah penanggulangan bencana dengan fokus pada upaya mewujudkan resiliensi berkelanjutan melalui penguatan tata kelola yang lebih terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi berbagai risiko bencana, termasuk bencana hidrometeorologi.⁴⁶

2. **Kebijakan Provinsi Riau**

Sepanjang 2025, Jikalauhari mencatat 4 kebijakan yang diterbitkan oleh Pemprov Riau, mulai dari peraturan daerah, peraturan gubernur, serta surat edaran terkait SDA-LH.

a. **Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Lingkungan Sungai**

Perda ini mengatur tentang Pengelolaan Sungai, mengatur mulai dari konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak, hingga peran serta masyarakat dan perizinan terkait sungai di wilayah Riau, bertujuan untuk pengelolaan yang terukur dan terintegrasi, termasuk penetapan sempadan sungai serta sanksi administratif bagi pelanggar.⁴⁷

b. **Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Sampah**

Perda ini mengatur tentang pengelolaan sampah yang merupakan panduan pemerintah daerah dalam rangka menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.⁴⁸

c. **Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah**

Pergub ini bertujuan sebagai pedoman bagi kabupaten/kota untuk mengatur besarnya nilai perolehan air tanah di wilayahnya sebagai upaya pengendalian dan pemanfaatan air tanah agar konservasi air tanah di wilayah Provinsi Riau agar tidak terjadi eksploitasi berlebihan dan memberikan sumber pendapatan daerah yang adil.⁴⁹

d. **Surat Edaran (SE) Gubernur Riau Nomor 3462/400.14.1/BPBD/2025 tentang 10 langkah utama antisipasi dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.**

Gubernur Riau mengeluarkan Surat Edaran yang berisikan 10 poin langkah-langkah yang harus dilakukan Pemkab/Pemkab dalam rangka pencegahan dan penanggulangan karhutla. Surat Edaran ini ditujukan kepada kepala daerah dan ditembuskan kepada sejumlah menteri seperti Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, BNPB, Kapolda dan BPBD se Riau.⁵⁰

⁴⁶ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/312007/peraturan-bnpb-no-1-tahun-2025>

⁴⁷ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/331216/perda-prov-riau-no-5-tahun-2025>

⁴⁸ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/325236/perda-prov-riau-no-4-tahun-2025>

⁴⁹ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/326410/pergub-prov-riau-no-23-tahun-2025>

⁵⁰ <https://mediacenter.riau.go.id/read/92533/cegah-karhutla-meluas-gubri-wahid-ingatkan-bu.html>



3. Kebijakan Pemerintah Kota/Daerah

Sepanjang 2025, Jikalauhari menemukan 11 kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah kota dan daerah, mulai dari peraturan walikota, peraturan bupati, serta surat keputusan terkait SDA-LH.

- a. Peraturan Walikota (Perwako) Pekanbaru Nomor 26 Tahun 2025 tentang perubahan peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 28 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan Perda Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah⁵¹
- b. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Kajian Resiko Bencana Kabupaten Kampar Tahun 2025-2030.⁵²
- c. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kampar Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana⁵³
- d. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 33 Tahun 2025 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2030.⁵⁴
- e. Surat Keputusan (SK) Bupati Siak Nomor 100.3.3.2/713/HKKPTS/2025 tanggal 22 Agustus 2025 tentang Pembentukan Tim Fasilitas Penyelesaian Konflik Hak Hutan dan Hak Atas Tanah Kabupaten Siak⁵⁵
- f. Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor Kpts. 255/X/2025 mengenai penyesuaian operasional PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) di Desa Lebu Lurus, Kecamatan Inuman⁵⁶
- g. Surat Edaran (SE) Bupati Bengkalis No. 300.2.1/BPBD/VII/2025/95, tentang Antisipasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)⁵⁷
- h. Surat Keputusan (SK) Bupati Kepulauan Meranti No. 114/HK/KPTS/II/2025 mengenai Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti resmi mengaktifkan status siaga kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) untuk tahun 2025.⁵⁸
- i. Surat Keputusan (SK) Walikota Pekanbaru No 492 Tahun 2025 tentang penetapan status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sejak 15 Mei – 30 November 2025.⁵⁹

⁵¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/330661/perwali-kota-pekanbaru-no-26-tahun-2025>

⁵² <https://peraturan.bpk.go.id/Details/322966/perbup-kab-kampar-no-13-tahun-2025>

⁵³ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/323066/perbup-kab-kampar-no-27-tahun-2025>

⁵⁴ <https://jdih.rokanhulukab.go.id/view/peraturan-bupati-rokan-hulu-nomor-33-tahun-2025-tentang-rencana-penanggulangan-bencana-tahun-2025-2029>

⁵⁵ https://siakkab.go.id/Tegakkan_Marwah_Negeri__LAMR_Siak_Resmi_Keluarkan_Maklumat_Tindak_Lanjut_Konflik_PT_SSL250826074140


⁵⁶ <https://riau.harianhaluan.com/daerah/1116087920/bupati-kuansing-segel-operasional-pt-gsl-karena-langgar-aturan-lingkungan>

⁵⁷ <https://diskominfo.bengkalis.go.id/web/detailberita/20398/pemkab-bengkalis-keluarkan-5-point-se-bupati-tentang-antisipasi-bencana-karhutla>

⁵⁸ <https://www.iniriau.com/detail/46834/langkah-cepat-cegah-kebakaran-meranti-tetapkan-status-siaga-karhutla>

⁵⁹ <https://mediacenter.riau.go.id/read/91912/pekanbaru-siaga-darurat-karhutla-warga-dimint.html>



- 
-
- j. Surat Keputusan (SK) Bupati Rokan Hulu Nomor 100.3.3.2/BPBD/214/2025 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana yang berlaku sejak 17 April 2025 hingga 30 November 2025.⁶⁰
 - k. Surat Keputusan (SK) Walikota Dumai No. 1066 Tahun 2025 mengenai status siaga bencana hidrometeorologi yang berlaku dari tanggal 5 Desember 2025 hingga 5 Februari 2026.⁶¹

⁶⁰ <https://www.cakaplah.com/berita/baca/122555/2025/04/22/pemkab-rohul-tetapkan-status-siaga-darurat-karhutla-228-hari#sthash.oujaBBHD.dpbs>

⁶¹ <https://www.riau1.com/berita/dumai/wako-paisal-tetapkan-status-siaga-bencana-hidrometeorologi-di-kota-dumai>



BAGIAN IV: KOMITMEN POLITIK NASIONAL DAN DAERAH



KOMITMEN POLITIK NASIONAL DAN DAERAH

Jikalau hari memotret komitmen, tingkah laku, dan keberpihakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota terhadap perlindungan dan pemulihan SDA-LH. Meningkatnya deforestasi, pembakaran hutan dan lahan, konflik lahan tidak lepas dari posisi pemerintah yang cenderung lebih berpihak pada kepentingan pelaku bisnis.

1. Komitmen Politik Nasional

Posisi politik nasional menunjukkan keberpihakan terhadap pengusaha besar. Presiden Prabowo Subianto aktif membangun relasi dengan oligarki “Sembilan Naga” pemilik Sinar Mas Group dan kelompok konglomerat besar lain, yang pada kenyataannya memiliki keterkaitan bisnis di sektor kehutanan, perkebunan, dan sumber daya alam.⁶² Pada 6 Maret 2025, Prabowo mengundang delapan pengusaha besar termasuk Indonesia ke Istana Negara untuk membahas program nasional dan dukungan sektor swasta terhadap agenda pemerintahan.

Pemilik korporasi yang diduga terlibat merusak lingkungan, mulai dari karhutla, perusak habitat satwa hingga penyebab konflik dan perampasan hak masyarakat justru berulang kali mendapat tempat istimewa, mulai diajak berkunjung ke luar negeri hingga diundang ke istana, bahkan ada program investasi yang membuat para konglomerat akan mendapat gelar “patriot” dari program *Patriot bonds*. Saat ini, Danantara tengah mempersiapkan *Patriot Bon II*.⁶³

Analisis Jikalau hari mengaitkan minimnya penindakan tegas terhadap perusak lingkungan ini dengan isu kedekatan politik Presiden dengan oligarki dan pengusaha besar, khususnya dalam konteks *Patriot Bond* — instrumen investasi yang dikaitkan dengan agenda swasembada pangan dan energi. Skema ini dikhawatirkan mengesampingkan keadilan lingkungan di wilayah rawan Karhutla seperti Riau. Pemerintah diduga terjebak dalam konflik kepentingan sistemik, di mana kebutuhan membiayai proyek pembangunan ambisius melalui Surat Berharga Negara (SBN) dan instrumen keuangan hijau seperti Green Bond justru mendorong toleransi terhadap praktik korporasi perusak lingkungan. Paradoksnya, stabilitas yang dijaga demi menarik investasi malah dibangun di atas asap dan abu kebakaran hutan.

Di samping itu menilik agenda yang dilakukan oleh Wakil Presiden (wapres) Gibran Rakabuming Raka, ia tercatat melakukan kunjungan kerja ke Riau sebanyak dua kali. Kunjungan tersebut berkaitan dengan karhutla dan Festival Pacu Jalur. Posisi politik lainnya ditunjukkan oleh kinerja para pembantu presiden. Berikut beberapa agenda menteri kabinet Prabowo-Gibran yang berkunjung ke Riau:

a. Menteri Lingkungan Hidup – Hanif Faisol Nurofiq


Hanif Faisol berkunjung ke Riau sebanyak tiga kali. Pada 11 Mei 2025, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq melakukan kunjungan kerja ke PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Pelalawan untuk menindaklanjuti aduan masyarakat terkait bau limbah yang diduga berasal dari aktivitas Korporasi. Pada kunjungan tersebut, Menteri meninjau pengelolaan 10 landfill limbah, dengan klaim tujuh landfill telah

⁶²

https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_terima_delapan_pengusaha_besar_bahas_perekonomian_dan_investasi_nasional

⁶³ <https://insight.kontan.co.id/news/patriot-bond-danantara-jilid-kedua-dikabarkan-terbit-lebih-cepat-dari-jadwal-awal>





memperoleh izin penutupan. Kementerian Lingkungan Hidup juga menyampaikan rencana menurunkan tim Deputi Penegakan Hukum (Gakkum) guna memeriksa kepatuhan pengelolaan limbah sesuai standar operasional prosedur (SOP).⁶⁴

Pada 26 Juli 2025, Menteri Hanif kembali hadir di Riau dalam konteks penanganan kebakaran hutan dan lahan (*karhutla*) yang masih menjadi isu lingkungan utama di provinsi Riau.⁶⁵ Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI menyelenggarakan kunjungan kerja dengan agenda:

- Koordinasi dengan BNPB, BMKG, TNI/POLRI, pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk memperkuat sinergi penanganan *karhutla*.
- Aksi kolaboratif dengan dunia usaha seperti RAPP, Sinar Mas Group, Pertamina Hulu Rokan, dan PTPN IV untuk pembangunan kapasitas pencegahan dan respons kebakaran.

Kunjungan ini menunjukkan fokus pemerintah pusat pada koordinasi lintas sektor dan tanggung jawab dunia usaha, namun tak banyak berita yang menyorot apakah langkah ini menghasilkan intervensi kebijakan strategis seperti pembatasan izin atau sanksi bagi pelanggar.

Selain dua agenda di atas, Menteri Hanif juga hadir meninjau implementasi program restorasi dan pelestarian kawasan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Kabupaten Pelalawan pada 13 Juli 2025. Saat berkunjung ia didampingi oleh Gubernur Riau dan Bupati Pelalawan, serta menyampaikan apresiasi kepada Satgas PKH dan TNI atas upaya pemulihan fungsi ekologi TNTN yang menjadi habitat penting berbagai spesies.⁶⁶

Kunjungan ini memperkuat posisi pemerintah pusat dalam agenda pelestarian kawasan konservasi, tetapi masih perlu diuji apakah ini diikuti dengan kebijakan pengetatan izin di area rawan konflik dan eksploitasi.

b. Menteri Kehutanan – Raja Juli Antoni

Arah kebijakan kehutanan nasional sepanjang 2025 juga sangat dipengaruhi oleh sikap dan langkah Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, terutama dalam merespons krisis deforestasi, kebakaran hutan dan lahan, konflik tenurial, serta tekanan terhadap kawasan konservasi di Provinsi Riau. Sejumlah kunjungan kerja dan pernyataan publik Menteri Kehutanan menunjukkan kehadiran negara di lapangan, namun Catatan Jikalahari mencermati bahwa pendekatan tersebut lebih menekankan aspek peninjauan, koordinasi, dan narasi simbolik. Di sisi lain, langkah korektif berupa evaluasi konsesi bermasalah, pengetatan izin, dan penegakan hukum struktural terhadap korporasi perusak hutan masih belum terlihat signifikan.


Raja Juli Antoni tercatat melakukan kunjungan kerja (*kunker*) bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN RI, Nusron Wahid, ke Provinsi Riau pada 24 April 2025. Rombongan keduanya disambut secara resmi oleh jajaran Forkopimda Riau dan DPRD Riau di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru. Kunker ini dijadwalkan untuk membahas isu strategis terkait tata ruang dan kehutanan di Riau termasuk masalah

⁶⁴ <https://rri.co.id/nasional/1511551/menteri-lh-tanggapi-aduan-limbah-rapp-di-riau>

⁶⁵ <https://kemenlh.go.id/news/detail/menteri-lh-dorong-kolaborasi-dunia-usaha-cegah-karhutla-di-riau-pengendalian-bukan-pilihan-tapi-kewajiban-bersama>

⁶⁶ <https://mediacenter.riau.go.id/read/92330/gajah-dan-harimau-tntn-terancam-menteri-lh-da.html>





konflik lahan, produktivitas kehutanan, serta sinkronisasi kebijakan ATR dan kehutanan.⁶⁷

Kunker bersama ini secara formal membahas tata ruang dan kehutanan, namun sejauh data publik yang tersedia belum menunjukkan hasil kebijakan konkret seperti pencabutan izin bermasalah atau moratorium perizinan di kawasan sensitif.

Pada akhir Juli 2025, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau untuk meninjau langsung kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di Kabupaten Rokan Hilir dan sekitarnya. Pada kunjungan tersebut, Menteri melakukan peninjauan udara menggunakan helikopter untuk memantau titik api serta membahas langkah antisipasi bersama aparat penegak hukum, BNPB, dan instansi terkait. Raja Juli menyatakan bahwa jumlah titik api menunjukkan penurunan, namun menekankan perlunya kewaspadaan tinggi terhadap cuaca ekstrem serta penguatan koordinasi dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran ilegal.⁶⁸

Kunjungan ini memperlihatkan kehadiran Menteri Kehutanan di episentrum karhutla, namun pendekatannya lebih berfokus pada peninjauan situasi dan kesiapsiagaan operasional. Tidak terlihat adanya langkah evaluatif terhadap kebijakan struktural, seperti peninjauan izin konsesi korporasi yang selama ini menjadi sumber konflik SDA–LH dan kebakaran berulang di Riau. Pernyataan Menteri mengenai penurunan titik api juga berlawanan dengan temuan Jikalahari yang mencatat bahwa pada Juli 2025 jumlah hotspot justru mencapai 2.176 titik, tertinggi sepanjang tahun.

Pada 28 November 2025, Menteri Raja Juli Antoni kembali ke Riau untuk mengunjungi Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Kabupaten Pelalawan. Menhut memantau kondisi kawasan konservasi yang menjadi habitat satwa liar seperti gajah dan harimau serta memberi makan satwa jinak sebagai simbol komitmen negara menjaga ekosistem. Pemerintah juga menyampaikan bahwa akan dilakukan relokasi warga yang terdampak di kawasan sekitar TNTN sebagai bagian dari upaya pemulihan ekosistem.⁶⁹

Pada kesempatan yang sama, Menteri Kehutanan juga menyerahkan Surat Keputusan penetapan status Hutan Adat Imbo Laghangan di Desa Jake, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5259 Tahun 2025 tentang Hutan Adat Imbo Laghangan, yang menetapkan kawasan seluas 405 hektare sebagai hutan adat.⁷⁰

Menjelang akhir tahun, pada 20 Desember 2025 Raja Juli juga hadir ke Riau dalam agenda relokasi dan pemulihan ekosistem. Meski narasi “negara hadir” kembali ditekankan, implementasi kebijakan tersebut perlu dikaji lebih lanjut, terutama terkait jaminan hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat yang direlokasi serta konsistensi pemulihan kawasan dari tekanan industri.⁷¹

Sepanjang tahun 2025, Jikalahari melihat dua pola berbeda dalam cara Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan merespons persoalan lingkungan di Riau. Menteri

⁶⁷ <https://dprd.riau.go.id/2025/04/24/waka-iii-dprd-riau-budiman-lubis-menyambut-kedatangan-menteri-agraria-dan-tata-ruang-kepala-bpn-ri-nusron-wahid-menteri-kehutanan-ri-raja-juli-antoni/>


⁶⁸ <https://www.kehutanan.go.id/news/article-60>

⁶⁹ <https://mediacenter.riau.go.id/read/94198/raja-juli-antoni-blusukan-ke-riau-tntn-jadi-r.html>

⁷⁰ <https://www.kehutanan.go.id/news/menhut-tetapkan-status-hutan-adat-di-kuantan-singingi-pelestarian-hutan-dan-penopang-budaya-pacu-jalur>

⁷¹ <https://gilangnews.com/news/detail/21162/program-relokasi-tntn-diluncurkan-menhut-tegaskan-negara-hadir-lindungi-hutan-dan-rakyat>





Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq lebih sering menunjukkan kedekatan secara langsung melalui kunjungan dan kerja sama dengan korporasi besar di sektor kehutanan dan perkebunan. Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terlihat tidak mengambil langkah tegas untuk memperbaiki atau mencabut izin konsesi kehutanan yang bermasalah. Meski caranya berbeda, keduanya berujung pada hal yang sama, yakni perlindungan lingkungan yang masih lemah dan hak-hak masyarakat terdampak yang belum terlindungi.

2. Komitmen Politik Pemerintah Provinsi Riau

Pemprov Riau cenderung merespons krisis lingkungan secara administratif seperti menetapkan status siaga darurat dan mengoordinasikan penanganan bencana melalui BPBD kabupaten/kota. Di sisi lain, langkah untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam secara mendasar masih lemah. Pemerintah provinsi tetap menjaga hubungan yang harmonis dengan korporasi besar pengambil manfaat SDA-LH seperti APP dan APRIL, yang selama ini berkontribusi terhadap deforestasi, karhutla, dan konflik lahan. Pada praktiknya, Pemprov Riau lebih berperan sebagai pengelola krisis, bukan sebagai penggerak perubahan struktural.

a. Konsolidasi dan Penanganan Karhutla di Provinsi Riau – 10 Mei 2025

Menjelang puncak musim kemarau dan periode rawan kebakaran, Pemerintah Pusat memerintahkan Pemprov Riau untuk mengonsolidasikan langkah mitigasi dan penanggulangan karhutla di provinsi Riau, mengundang keterlibatan aktif pihak korporasi perkebunan dan PBPH dalam suatu komando terpadu yang mencakup pencegahan dan respons cepat. Instruksi ini disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup kepada Gubernur Riau dalam pertemuan koordinasi penanganan karhutla.⁷²

Meskipun menunjukkan adanya koordinasi formal, pendekatan ini masih sangat bergantung pada peran korporasi besar seperti RAPP sebagai bagian dari strategi pencegahan, padahal korporasi sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas dampak operasional mereka, terutama PBPH yang wilayah izinnya kerap terdeteksi hotspot. Pola kolaborasi pemerintah–korporasi ini berpotensi mengaburkan tanggung jawab korporasi atas kerusakan ekologis dan melemahkan penegakan hukum.

b. Green for Riau

Di tingkat kebijakan daerah, Pemerintah Provinsi Riau mendeklarasikan program *Green for Riau* sebagai komitmen untuk mendorong pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan hutan dan lahan lestari, pengembangan skema REDD+, investasi hijau, serta penguatan kolaborasi lintas pihak dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Program ini diposisikan sebagai upaya menurunkan emisi gas rumah kaca dan merestorasi ekosistem. Namun, dengan luas kawasan hutan sekitar 5,4 juta hektar dan lahan gambut sekitar 5,3 juta hektar, serta dominasi konsesi hutan tanaman industri dan perkebunan sawit sebagai sumber tekanan utama, tantangan terbesar terletak pada implementasi kebijakan di lapangan. Hingga 2025, deforestasi, degradasi gambut, konflik sumber daya alam, serta kebakaran hutan dan lahan masih terus terjadi di Provinsi Riau.⁷³

⁷² <https://halloriaru.com/read-pemprov-riau-14607376-2025-05-11-menteri-lh-instruksikan-gubri-lakukan-langkah-mitigasi-dan-konsolidasi-penanganan-karhutla.html>

⁷³ <https://mediacenter.riau.go.id/read/91301/deklarasi-green-for-riau-pemprov-komitmen-tur.html>



c. Balon Udara Berlogo APRIL Group di Halaman Kantor Gubernur Riau

Pada 7 Agustus 2025, menjelang peringatan Hari Jadi Provinsi Riau, Pemprov Riau memasang balon udara berlogo APRIL Group di halaman Kantor Gubernur. Hal ini menunjukkan Gubernur Riau memberikan ruang istimewa kepada korporasi besar yang sedang terkait kasus lingkungan. Tindakan ini tidak selaras dengan janji pemerintahan untuk melindungi lingkungan dan justru dapat dianggap sebagai bentuk *greenwashing* legislatif terhadap korporasi bermasalah.⁷⁴

3. Komitmen Politik Pemerintah Daerah

Untuk membaca secara lebih objektif komitmen politik pemerintah kabupaten dan kota di Riau dalam isu sumber daya alam dan lingkungan hidup (SDA-LH), Jikalahari menilai setiap daerah berdasarkan empat indikator kunci, yakni luas deforestasi, karhutla, bencana banjir, serta konflik masyarakat dengan korporasi. Keempat indikator ini dipilih karena merepresentasikan dampak langsung dari tata kelola ruang, kebijakan perizinan, dan kapasitas pengawasan pemerintah daerah. Melalui indikator tersebut, Catatan Akhir Tahun ini menelaah sejauh mana bupati dan wali kota merespons krisis ekologis di wilayahnya—apakah kebijakan yang diambil bersifat korektif dan melindungi ruang hidup masyarakat, atau sekadar reaktif dan administratif tanpa menyentuh akar persoalan SDA-LH.

a. Kota Pekanbaru

Komitmen Pemkot Pekanbaru dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup cenderung terbatas pada respons kebencanaan. Pada isu deforestasi, tidak ditemukan kebijakan atau instrumen daerah yang secara spesifik mengatur pengendalian alih fungsi lahan maupun perlindungan ruang hijau.

Berkaitan dengan karhutla, Pemkot Pekanbaru menetapkan Status Siaga Karhutla melalui Surat Keputusan Wali Kota Nomor 492 Tahun 2025 yang berlaku sejak 15 Mei hingga 30 November 2025.⁷⁵ Respons serupa juga terlihat pada persoalan banjir. Pemerintah Kota Pekanbaru menerbitkan Surat Keputusan Wali Kota Nomor 1055 Tahun 2025 tentang Status Siaga Bencana Hidrometeorologi yang berlaku dari 3 Desember 2025 hingga 31 Januari 2026.⁷⁶

Sementara itu, pada isu konflik lahan, Jikalahari tidak menemukan adanya kebijakan, surat keputusan, maupun mekanisme khusus yang disiapkan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mencegah atau menyelesaikan konflik agraria dan sengketa ruang.

b. Kabupaten Siak

Di Kabupaten Siak, respons pemda terhadap persoalan SDA-LH sepanjang 2025 relatif lebih beragam. Pemkab Siak tidak hanya merespons isu ekologis melalui kebijakan reaktif, tetapi juga memasukkan agenda lingkungan dalam perencanaan pembangunan dan mekanisme penyelesaian konflik.

Pada aspek deforestasi, Pemkab Siak menempatkan isu lingkungan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 melalui pendekatan *Siak Hijau* yang menekankan pembangunan berkelanjutan. Penempatan

⁷⁴ <https://www.suara-demokrasi.com/perusak-lingkungan-jikalahari-desak-gubri-hentikan-budaya-pasang-balon-berlogo-april-group-di-tuah-negeri>

⁷⁵ <https://mediacenter.riau.go.id/read/91912/pekanbaru-siaga-darurat-karhutla-warga-dimint.html>

⁷⁶ <https://mediacenter.riau.go.id/read/94446/tetapkan-status-siaga-darurat-bencana-hidrome.html>



isu SDA–LH dalam dokumen perencanaan strategis ini menunjukkan komitmen politis awal untuk mengintegrasikan perlindungan lingkungan ke dalam arah pembangunan daerah.⁷⁷

Terkait karhutla, Pemkab Siak mengembangkan pendekatan berbasis insentif melalui Program TAKE 2025 (Dana Kabupaten Berbasis Ekologi). Program ini memberikan dukungan pendanaan kepada 92 kampung berdasarkan kinerja lingkungan, dengan fokus pencegahan karhutla dan penguatan ekonomi desa berbasis ekologi.⁷⁸ Selain itu, Pemkab Siak menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 16 April hingga 30 November 2025 sebagai langkah pencegahan dini, disertai penguatan koordinasi lintas sektor dan edukasi masyarakat desa.⁷⁹

Untuk bencana banjir, Pemkab Siak menerbitkan SK Bupati Siak Nomor 100.3.3.2/868/HK/KPTS/2025 tentang penetapan status siaga darurat bencana hidrometeorologi yang berlaku sejak 5 Desember 2025 hingga 31 Januari 2026.⁸⁰

Pada isu konflik lahan, Kabupaten Siak menjadi salah satu daerah yang secara eksplisit membentuk mekanisme kelembagaan melalui SK Bupati Siak Nomor 100.3.3.2/713/HKKPTS/2025 tentang pembentukan Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Hak Hutan dan Hak Atas Tanah.⁸¹ Tim ini menjadi payung bagi penyelesaian sejumlah konflik, termasuk konflik antara PT Triomas FDI dengan masyarakat Kampung Penyengat di Kecamatan Sungai Apit, serta sengketa lahan dengan PT Sinarmas yang ditangani melalui dialog langsung⁸². Konflik paling menonjol terjadi antara masyarakat Kampung Tumang dan PT Seraya Sumber Lestari (SSL), yang telah berlangsung lama dan memicu aksi massa. Dalam konteks ini, Bupati Siak menyatakan sikap tegas dengan mengancam akan mengusulkan pencabutan izin Korporasi apabila konflik tidak diselesaikan secara adil.⁸³

c. Kabupaten Pelalawan

Di Kabupaten Pelalawan, komitmen pemda terhadap isu SDA–LH pada 2025 terlihat terbatas dan belum merata di seluruh indikator krisis ekologis. Pada aspek deforestasi, Bupati Pelalawan menghadiri peluncuran program Relokasi dan Pemulihan Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) pada 20 Desember 2025 di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui. Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda pemerintah pusat dan provinsi dalam memulihkan kawasan konservasi yang selama bertahun-tahun mengalami perambahan, deforestasi, dan konflik tenurial.⁸⁴

⁷⁷ <https://infopublik.id/kategori/nusantara/941281/rpjmd-2025-2029-bupati-afni-tekanan-pembangunan-berkelanjutan-dan-siak-hijau>

⁷⁸ <https://www.cakaplah.com/berita/baca/118968/2025/01/08/dianggarkan-rp17-miliar-tahun-ini-92-kampung-di-siak-terima-dana-take#sthash.37MOEOCC.dpbs>

⁷⁹ <https://ppid.riau.go.id/berita/20069/giliran-pemkab-siak-tetapkan-status-siaga-darurat-karhutla>

⁸⁰ <https://catatanriau.com/news/detail/28092/bupati-siak-tetapkan-status-siaga-darurat-bencana-hidrometeorologi-hingga-januari-2026>


⁸¹ https://siakkab.go.id/Tegakkan_Marwah_Negeri_LAMR_Siak_Resmi_Keluarkan_Maklumat_Tindak_Lanjut_Konflik_PT_SSL250826074140

⁸² https://siakkab.go.id/Bupati_Afni_Minta_PT_Triomas_Duduk_bersama_Cari_Solusi_Terbaik_Atasi_Konflik250815071855

⁸³ <https://www.riauinfo.com/detail/47217/beda-versi-pertemuan-damai-bupati-siak-ancam-cabut-izin-pt-ssl-di-tengah-konflik-lahan>

⁸⁴ <https://web.pelalawankab.go.id/bupati-pelalawan-ikuti-launching-relokasi-dan-pemulihan-kawasan-tn-tesso-nilo/>





Pada indikator karhutla serta banjir, Jikalauhari tidak menemukan kebijakan atau keputusan daerah yang secara khusus diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan sepanjang 2025. Sementara itu, untuk aspek konflik lahan tidak ditemukan kebijakan apapun yang berkaitan dengan hal ini.

d. Kota Dumai

Pada indikator deforestasi, Jikalauhari tidak menemukan kebijakan atau instrumen daerah yang secara khusus ditujukan untuk pengendalian kehilangan tutupan hutan atau penataan ruang berbasis perlindungan ekologi. Pada aspek karhutla, Pemkot Dumai menetapkan SK Wali Kota Dumai Nomor 221/BPBD/2025 tentang Status Siaga Darurat Karhutla yang berlaku sejak 12 Februari hingga 30 November 2025.⁸⁵

Sementara itu, pada indikator banjir dan bencana hidrometeorologi, Pemkot Dumai menerbitkan Surat Keputusan Wali Kota Dumai Nomor 1066 Tahun 2025 tentang penetapan status siaga bencana hidrometeorologi yang berlaku dari 5 Desember 2025 hingga 5 Februari 2026.⁸⁶

Pada indikator konflik lahan, Jikalauhari tidak menemukan kebijakan atau mekanisme khusus yang diterbitkan Pemerintah Kota Dumai sepanjang 2025 untuk menangani konflik agraria atau sengketa ruang hidup masyarakat.

e. Kabupaten Rokan Hulu (Rohul)

Komitmen Pemkab Rokan Hulu terhadap isu SDA-LH terlihat melalui kebijakan perencanaan dan respons kebencanaan. Pada indikator deforestasi, Pemkab Rohul melalui Bappeda menyelenggarakan Forum Komunikasi Publik RPJMD 2025–2029 yang menempatkan pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup sebagai salah satu arah kebijakan utama.⁸⁷

Pada aspek karhutla, Pemkab Rohul menetapkan SK Bupati Rokan Hulu Nomor 100.3.3.2/BPBD/214/2025 tentang Status Siaga Darurat Karhutla yang berlaku sejak 17 April hingga 30 November 2025.⁸⁸ Untuk indikator banjir dan bencana hidrometeorologi, Pemkab Rohul menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2025–2030, yang menjadi kerangka perencanaan penanggulangan bencana jangka menengah.⁸⁹

Selain itu Pemkab juga mengeluarkan SK Bupati Nomor 100.3.3.2/BPBD/214/2025 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana yang berlaku sejak 17 April 2025 hingga 30 November 2025.⁹⁰ Sementara pada indikator konflik lahan, Pemkab Rohul terlibat

⁸⁵ <https://ppid.riau.go.id/berita/20071/karhutla-di-riau-2025--77-81-hektare-lahan-terbakar--status-siaga-ditetapkan-di-beberapa-wilayah>

⁸⁶ <https://www.riau1.com/berita/dumai/wako-paisal-tetapan-status-siaga-bencana-hidrometeorologi-di-kota-dumai>

⁸⁷ <https://mediacenter.rokanhulukab.go.id/view/wabup-h-syafaruddin-poti-s-h-m-m-buka-forum-komunikasi-publik-rpjmd-rohul-2025-2029>

⁸⁸ <https://www.cakaplah.com/berita/baca/122555/2025/04/22/pemkab-rohul-tetapan-status-siaga-darurat-karhutla-228-hari#sthash.OujaBBHD.d49aAEL9.dpbs>

⁸⁹ <https://jdih.rokanhulukab.go.id/view/peraturan-bupati-rokan-hulu-nomor-33-tahun-2025-tentang-rencana-penanggulangan-bencana-tahun-2025-2029>

⁹⁰ <https://www.cakaplah.com/berita/baca/122555/2025/04/22/pemkab-rohul-tetapan-status-siaga-darurat-karhutla-228-hari#sthash.OujaBBHD.dpbs>



dalam mediasi konflik antara PT Merangkai Artha Nusantara dan warga Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara.⁹¹

f. Kabupaten Rokan Hilir (Rohil)

Respons Pemkab Rohil terhadap persoalan SDA-LH masih didominasi oleh pendekatan perencanaan dan penanganan administratif, sementara kebijakan operasional di lapangan relatif terbatas. Pada indikator deforestasi, Pemkab Rohil melalui Bappeda melanjutkan proses penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD 2025–2029 melalui Konsultasi Publik II⁹². Namun, di tengah tingginya deforestasi dan dominasi konsesi di Rohil, KLHS masih berada pada tahap normatif dan belum diterjemahkan menjadi kebijakan pengendalian deforestasi yang konkret.

Pada indikator karhutla, tidak ditemukan kebijakan khusus yang diterbitkan Pemkab Rohil sepanjang 2025. Ketiadaan kebijakan ini menjadi catatan penting karena berdasarkan temuan Jikalauhari Rohil merupakan salah satu wilayah dengan kerentanan karhutla tinggi, terutama pada kawasan gambut dan areal konsesi kehutanan serta perkebunan.

Untuk indikator banjir dan bencana hidrometeorologi, Pemkab Rohil menetapkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 162 Tahun 2025 tentang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi.⁹³ Pada indikator konflik, Pemkab Rohil memfasilitasi mediasi konflik antara masyarakat Kepenghuluan Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, dengan Korporasi PBPH PT Ruas Utama Jaya (RUJ).⁹⁴

g. Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil)

Respons Pemkab Indragiri Hilir (Inhil) terhadap persoalan SDA-LH belum merata di seluruh indikator kunci. Pada aspek deforestasi, tidak ditemukan kebijakan daerah yang secara spesifik diarahkan untuk pengendalian kehilangan hutan atau perlindungan ekosistem.

Hal serupa juga terlihat pada indikator karhutla, Pemkab Inhil tidak menerbitkan kebijakan khusus terkait pencegahan dan pengendalian karhutla. Ketiadaan kebijakan ini menjadi catatan penting mengingat karakteristik wilayah Inhil yang didominasi lahan gambut dan rawan terbakar saat musim kemarau.

Pada indikator banjir dan bencana hidrometeorologi, Pemkab Inhil menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi.⁹⁵ Untuk indikator konflik lahan, Pemkab Inhil memfasilitasi mediasi konflik antara warga Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, dengan PT THIP. Konflik yang dipicu dampak replanting Korporasi terhadap kebun masyarakat—termasuk serangan hama kumbang—berujung pada penandatanganan kesepakatan bersama pada 7 Maret 2025.⁹⁶

⁹¹ <https://riaupos.jawapos.com/rokan-hulu/2256456134/demo-karyawan-pt-man-sampaikan-4-tuntutan-ketua-dprd-rohil-perlu-proses-dan-kesabaran>

⁹² <https://mediacenter.rohilkab.go.id/view/pemkab-rohil-kembali-menggelar-konsultasi-publik-ii-penyusunan-klhs-dan-rpjmd-tahun-2025-2029>

⁹³ <https://mediacenter.rohilkab.go.id/view/rokan-hilir-siaga-bupati-ingatkan-ancaman-akhir-tahun>

⁹⁴ <https://mediacenter.rohilkab.go.id/view/dihadiri-peting>

⁹⁵ <https://mediacenter.riau.go.id/read/91128/10-daerah-di-riau-tetapkan-status-siaga-darurat.html>

⁹⁶ <https://gagasanriau.com/news/detail/49830/bupati-inhil-saksikan-proses-mediasi-masyarakat-dengan-pt-thip>



h. Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu)

Pada aspek deforestasi, tidak ditemukan kebijakan daerah yang secara khusus diarahkan untuk pengendalian kehilangan tutupan hutan. Pada indikator karhutla, Pemkab Inhu menetapkan status siaga karhutla tahun 2025 sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau.⁹⁷

Untuk indikator banjir dan bencana hidrometeorologi, Pemkab Inhu menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi dalam Rapat Koordinasi pada 11 Desember 2025.⁹⁸ Pada indikator konflik lahan, Pemkab Inhu menunjukkan peran yang relatif lebih aktif. Bupati Indragiri Hulu, menyatakan dukungan terhadap pengukuran ulang Hak Guna Usaha (HGU) PT Sinar Belilas Perkasa (SBP) di wilayah eks HGU PT Alam Sari Lestari (ASL).⁹⁹

i. Kabupaten Bengkalis

Pada indikator deforestasi, Pemkab Bengkalis meluncurkan Program Bengkalis Lestari pada 26 November 2025 sebagai kerangka pembangunan daerah yang mengintegrasikan perlindungan lingkungan, mitigasi perubahan iklim, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program ini melibatkan kolaborasi lintas sektor, termasuk organisasi masyarakat sipil, komunitas lingkungan, serta dukungan pemerintah pusat dan provinsi.¹⁰⁰

Pada indikator karhutla, Pemkab Bengkalis menetapkan Status Siaga Karhutla melalui SK Bupati Nomor 128/KPTS/III/2025 yang berlaku sejak 11 Februari hingga 30 September 2025.¹⁰¹ Kebijakan ini diperkuat dengan Surat Edaran Bupati Bengkalis Nomor 300.2.1/BPBD/VII/2025/95 tentang antisipasi karhutla pada Agustus 2025.¹⁰²

Untuk indikator banjir dan bencana hidrometeorologi, Pemkab Bengkalis menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi melalui SK Bupati Nomor 406/KPTS/XII/2025 pada 11 Desember 2025.¹⁰³ Sementara itu, pada indikator konflik lahan, sepanjang 2025 tidak ditemukan kebijakan atau langkah konkret Pemkab Bengkalis yang secara spesifik diarahkan untuk penyelesaian konflik tenurial antara masyarakat dan korporasi.

j. Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing)

Pada indikator banjir dan longsor, Pemkab Kuansing menetapkan status siaga bencana menyusul peringatan cuaca ekstrem dari BMKG yang memprediksi peningkatan curah hujan dan risiko banjir, longsor, serta angin kencang. Langkah yang diambil meliputi pengaktifan posko siaga, pemantauan debit sungai hingga tingkat desa, penyiapan

⁹⁷ <https://kpbd.inhukab.go.id/siaga-darurat-bencana-karhutla/>

⁹⁸ https://riaudetil.com/riau/indragiri-hulu/pemkab-inhu-tetapkan-status-siaga-darurat-bencana-hidrometeorologi_2025-12-11

⁹⁹ <https://riau.harianhaluan.com/daerah/1116054826/bupati-inhu-tegas-konflik-harus-diakhiri-bpn-diminta-ukur-ulang-hgu-eks-pt-alam-sari-lestari>

¹⁰⁰ <https://prokopim.bengkaliskab.go.id/web/detailberita/17237/bupati-kasmarni-luncurkan-program-bengkalis-lestari%2C-tonggak-penyelamatan-ekosistem-dan-kesejahteraan>

¹⁰¹ <https://ppid.riau.go.id/berita/20071/karhutla-di-riau-2025-77-81-hektare-lahan-terbakar-status-siaga-ditetapkan-di-beberapa-wilayah>

¹⁰² <https://diskominfotik.bengkaliskab.go.id/web/detailberita/20398/pemkab-bengkalis-keluarkan-5-point-se-bupati-tentang-antisipasi-bencana-karhutla>

¹⁰³ <https://www.riau24.com/berita/baca/1766567646-terdampak-banjir-pemerintah-gelar-rakor-kesiapsiagaan>



skenario penanganan darurat, serta penyediaan personel dan sarana pendukung seperti tenda posko dan perahu karet di kawasan Teluk Kuantan.¹⁰⁴

Pada indikator konflik lahan, Pemkab Kuansing menerbitkan SK Bupati Nomor Kpts/211/VIII/2025 tentang pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kenagorian Jake di Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah. Keputusan ini menjadi langkah penting dalam pengakuan hak masyarakat adat atas wilayah kelola dan identitas hukum mereka.¹⁰⁵ Sementara untuk kebijakan terkait deforestasi dan karhutla tidak ditemukan pada Kabupaten Kuansing.

k. Kabupaten Kepulauan Meranti

Kebijakan Pemkab Kepulauan Meranti di sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup lebih berfokus pada penanganan risiko bencana dan konflik lahan. Tidak ditemukan kebijakan yang berkaitan dengan deforestasi.

Pada isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Pemkab Kepulauan Meranti menetapkan Status Siaga Karhutla melalui SK Bupati Nomor 114/HK/KPTS/II/2025.¹⁰⁶ Pada indikator banjir dan bencana hidrometeorologi, Pemkab Meranti juga menetapkan Status Siaga Bencana Hidrometeorologi melalui Surat Keputusan Bupati yang berlaku sejak 12 November hingga 31 Desember 2025.¹⁰⁷

Sementara itu, pada indikator konflik lahan, Pemkab Kepulauan Meranti mengambil peran aktif dengan memimpin langsung mediasi sengketa lahan antara warga Desa Tanjung Medang dan PT Sumatera Riang Lestari (PT SRL) pada 13 Januari 2025. Hasil mediasi menghasilkan kesepakatan rencana penghentian sementara operasional PT SRL di lahan yang bersinggungan dengan wilayah kelola masyarakat desa.¹⁰⁸

l. Kabupaten Kampar

Pada Indikator deforestasi, Pemkab Kampar pada 2025 mulai mendorong penguatan kerangka kebijakan lingkungan melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Ranperda ini diposisikan sebagai landasan hukum daerah untuk pengelolaan lingkungan hidup yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan, sekaligus menunjukkan komitmen politis memasukkan isu SDA-LH dalam perencanaan pembangunan daerah.¹⁰⁹

Sepanjang 2025, tidak ditemukan kebijakan spesifik Pemerintah Kabupaten Kampar yang secara khusus ditujukan untuk pencegahan dan penanganan karhutla. Terkait mitigasi bencana hidrometeorologi Pemkab Kampar mengeluarkan Perbup Nomor 27 Tahun 2025¹¹⁰ dan Perbup Nomor 13 Tahun 2025 tentang Kajian Risiko Bencana 2025–

¹⁰⁴ <https://pekanbarupos.co/2025/11/30/siaga-bencana-di-kuansing-bupati-waspada-daerah-dekat-sungai-dan-tebing/>

¹⁰⁵ <https://kuansingterkini.com/news/detail/11057/sk-hutan-adat-bukti-tanah-ulyat%C2%A0jake-telah-diakui-pemerintah>

¹⁰⁶ <https://www.iniriau.com/detail/46834/langkah-cepat-cegah-kebakaran-meranti-tetapkan-status-siaga-karhutla>

¹⁰⁷ <https://merantikab.go.id/berita/pemkab-meranti-tetapkan-status-siaga-bencana-hidrometeorologi-hingga-31-desember-2025-mendatang>

¹⁰⁸ https://www.sabangmeraukenews.com/berita/23492/konflik-dengan-pt-srl-di-pulau-rangsang-kembali-memas-pemkab-meranti-komitmen-fasilitasi-aspirasi-.html?page=all&utm_source=chatgpt.com

¹⁰⁹ <https://riau.kemenkum.go.id/berita-utama/perkuat-harmonisasi-regulasi-lingkungan-kemenkum-riau-dukung-pembahasan-ranperda-rpplh-kabupaten-kampar>

¹¹⁰ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/323066/perbup-kab-kampar-no-27-tahun-2025>



2030, pemerintah daerah memperkuat kerangka penanggulangan banjir dan longsor. Selain itu, Status Siaga Darurat Bencana ditetapkan sejak 10 Desember 2025 hingga 30 Januari 2026.¹¹¹

Konflik agraria masih menjadi persoalan menahun di Kampar. Sepanjang 2025, tercatat konflik antara warga Desa Siabu dengan PT Ciliandra Perkasa, sengketa eks CV Makmur Jaya Sentosa (PT Jimmy) dengan kelompok tani Kampar Jaya Bersama, serta konflik lahan sawit di Desa Senama Nenek. Pemkab Kampar merespons melalui mediasi dan koordinasi lintas instansi, termasuk Dinas Perkebunan, BPN, dan kepolisian, dengan fokus pada fasilitasi dialog dan verifikasi dokumen HGU maupun izin Korporasi.

Tabel 14. Indeks Kebijakan Pemerintah Kabupaten/ Kota Riau Sepanjang 2025

Kabupaten/Kota		Deforestasi*	Karhutla	Banjir	Konflik
Pekanbaru	Kejadian	-	49 ha	3.354 KK	-
	Respon	-	1	1	-
Siak	Kejadian	1%	255 ha	110 KK	1
	Respon	1	2	1	4
Pelalawan	Kejadian	1%	1.028 ha	3.336 KK	-
	Respon	1	-	-	-
Dumai	Kejadian	5%	288 ha	141 KK	-
	Respon	-	1	1	-
Rokan Hulu	Kejadian	7%	3.175 ha	5.332 KK	1
	Respon	1	1	2	1
Rokan Hilir	Kejadian	8%	12.128 ha	229 KK	1
	Respon	1	-	1	1
Indragiri Hilir	Kejadian	1%	255 ha	5.188 KK	1
	Respon	-	-	1	1
Indragiri Hulu	Kejadian	1%	155 ha	475 KK	1
	Respon	-	1	1	1
Bengkalis	Kejadian	2%	1.031 ha	459 KK	1
	Respon	1	2	1	-
Kuantan Singingi	Kejadian	1%	207 ha	338 KK	-

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/322966/perbup-kab-kampar-no-13-tahun-2025>

¹¹¹ <https://kuansingterkini.com/news/detail/11057/sk-hutan-adat-bukti-tanah-ulayat%C2%A0jake-telah-diakui-pemerintah>



	Respon	-	-	1	1
Kepulauan Meranti	Kejadian	3%	525 ha	150 KK	1
	Respon	-	1	1	1
Kampar	Kejadian	2%	575 ha	2.231 KK	1
	Respon	1	-	3	1

* Nilai Deforestasi merupakan persentase deforestasi terhadap tutupan hutan alam tersisa 2025

* Respon merupakan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan permasalahan SDA-LH yang terjadi

Dari tabel Indeks Kebijakan Pemerintah Kabupaten/ Kota Riau Sepanjang 2025, Rokan hilir menempati posisi pertama sebagai kabupaten dengan kerusakan SDA-LH terburuk karena deforestasi di tahun 2025 tertinggi dan luas kahrhutlanya terluas. Sementara, tidak ada respon dari bupati baik secara aturan maupun statement media.

Untuk banjir, Indragiri Hilir menempati posisi pertama karena jumlah KK terdampak tidak sebanding dengan respon yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten.

Untuk keseluruhan tabel indeks kebijakan pemerintah kabupaten/kota se provinsi Riau, Siak menjadi provinsi dengan respon pemerintah terbaik terhadap isu SDA-LH.



Epilog

Takut Oligarki = Bencana Ekologis Berlanjut

Aktivitas korporasi berdampak pada perubahan iklim dan kerawanan bencana. Banjir Bandang dan Longsor di Sumatera menelan korban (bencana non Tsunami, Gempa dan Gunung Meletus) terbanyak dalam sejarah Indonesia

Dampak kerusakan akibat banjir dan longsor begitu terlihat jelas dan memilukan, baik di media maupun dilihat langsung di lapangan. 15 hari pasca banjir bandang dan longsor, Jikalauhari bersama beberapa organisasi non pemerintah, mahasiswa dan dosen berangkat ke Nagari Padang Laweh Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumbar. Menggunakan 3 unit mobil, kami sampai lokasi pada Jumat, 12 Desember 2025 sore hari.

Kami melihat bagaimana besarnya dampak dari bencana hidrometeorologi yang terjadi di sana. Ada 26 rumah warga yang tidak bisa dihuni, bahkan hilang, jalanan tertimbun material longsor berupa lumpur pasir dan batu, irigasi rusak, sawah gagal panen hingga aliran sungai yang berpindah jalur. Meski begitu, warga yang kami datangi masih merasa bersyukur karena tidak ada yang menjadi korban jiwa di lokasi tersebut.

Kami menyerahkan kebutuhan infrastruktur instalasi air bersih berupa pipa, seling hingga perlengkapan lainnya. Instalasi air bersih tersebut dibeli dari uang donasi yang dikumpulkan oleh Jikalauhari, Jurusan Biologi FMIPA UNRI, Mata Garuda Sumbar, Brimapala Sungkai, Koalisi Air Rakyat, Mapala Phylomina dan Mapala Humendala. Total donasi yang berhasil dihimpun sebesar Rp37.350.000,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Selain infrastruktur air bersih, kami juga membawa kebutuhan kegiatan *trauma healing*, mulai dari makanan ringan, susu UHT, buah-buahan segar, mainan anak-anak hingga perlengkapan menulis dan menggambar. 40an anak-anak terdampak banjir longsor tampak antusias dan bersemangat.


Kebijakan Pemerintah dan Pelaku Kejahatan Ekologis

Pemerintah gagap menghadapi bencana, padahal BMKG telah memperingatkan adanya cuaca ekstrem, badai Senyar, 8 hari sebelum kejadian. Meski mengaku sanggup menangani bencana, menolak status bencana nasional dan menolak bantuan negara luar, penanganan korban dinilai lambat dan tanpa komando yang jelas. Pemerintah menyia-nyiakan “*The Golden Hour*” (Jam Emas), yaitu periode krusial segera setelah bencana terjadi di mana peluang menyelamatkan nyawa sangat tinggi. Justru dua minggu pasca banjir pertama kali terjadi, para relawan, influencer menunjukkan betapa korban banjir belum tertangani. Bahkan Di Aceh, meski telah memasuki minggu ke tiga pasca bencana masih ada 80 desa terisolir.¹¹²

Banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatera dampaknya benar-benar dahsyat. Banjir dinilai tidak terjadi semata-mata dampak dari pemanasan global begitu nyata seperti anomali cuaca lahirnya badai senyar di sekitar garis khatulistiwa, jauh dari itu, kerusakan hutan di hulu daerah aliran sungai. Ribuan, mungkin jutaan gelondongan kayu menjadi material banjir bandang yang menghancurkan rumah-rumah warga. Pada 28 November 2025, Walhi Sumatera Utara, merilis 7 Korporasi yang diduga menjadi penyebab banjir bandang di Sumatera Utara.

¹¹² <https://www.metrotvnews.com/play/NniCWr9W-puluhan-desa-di-aceh-tengah-masih-terisolasi>





Ke tujuh Korporasi tersebut adalah PT Agincourt Resources – Tambang emas Martabe, PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) – PLTA Batang Toru, PT Pahae Julu Micro-Hydro Power – PLTMH Pahae Julu, PT SOL Geothermal Indonesia – Geothermal Taput, PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) – Unit PKR di Tapanuli Selatan, PT Sago Nauli Plantation – Perkebunan sawit di Tapanuli Tengah dan PTPN III Batang Toru Estate – Perkebunan sawit di Tapanuli Selatan. Ketujuhnya beroperasi di atau sekitar ekosistem Batang Toru, habitat orang utan Tapanuli, harimau Sumatera, tapir, dan spesies dilindungi lainnya.

Kerusakan hutan akibat aktifitas manusia juga diakui sendiri oleh Pemerintah. Presiden memerintahkan bareskrim polri menyelidiki penyebab banjir, khususnya asal material kayu gelondongan. Menteri kehutanan mengklaim akan mencabut 22 izin Korporasi. Pada sidang kabinet tanggal 15 Desember 2025, Presiden juga meminta Menhut untuk memanggil TNI-Polri untuk membantu investigasi Korporasi yang terbukti melanggar peraturan sehingga berdampak pada banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera (Antara).

Kemudian pada 24 Desember 2025, Burhanudin, Jaksa Agung menyebut ada 27 Korporasi diduga menjadi penyebab banjir dan longsor di Sumatera “Satgas PKH telah melakukan identifikasi dengan temuan yakni sejumlah besar entitas korporasi dan perorangan terindikasi kontribusi terhadap bencana bandang, dan Satgas PKH telah melakukan klarifikasi terhadap 27 Korporasi yang tersebar di tiga provinsi tersebut,” kata Burhanuddin.

Namun hingga kini, belum ada satupun yang menjadi tersangka, baik dari pelaku perusakan hutan, maupun pejabat yang menerbitkan izin dan pejabat yang lalai dalam menjaga dan mengawasi hutan. Dugaan publik mengapa Prabowo enggan menetapkan banjir bandang Sumatera menjadi bencana nasional kini beralih, tak hanya sekedar gengsi, tapi ada niatan menutupi adanya kejahatan lingkungan dan hutan.

Melihat begitu besar dampak banjir Sumatera, kerusakan ekologis penyebabnya dinilai memenuhi syarat kejahatan ke-lima dalam Statuta Roma. Ditinjau dari pra dan pasca terjadinya bencana, banjir Sumatera dapat disebut sebagai kemanusiaan internasional dan Pemerintah Indonesia harus dimintai pertanggungjawaban sebagai. Pada pra bencana, terjadi kejahatan dalam dua hal. *Pertama*, pemberian izin untuk kepentingan korporasi yang mengakibatkan deforestasi, *kedua*, lemahnya pengawasan dan penegakkan hukum dan *ketiga*, pengabaian terhadap peringatan dari BMKG.


Pasca bencana, penanganan korban berjalan lambat di mana, hampir sebulan pasca banjir, masih terdapat desa yang terisolir. Di Aceh, berbagai wilayah bahkan mengibarkan bendera putih. Pemerintah enggan menetapkan status bencana nasional dan menolak bantuan dari negara lain. Di sisi lain komunikasi dari Pemerintah dinilai buruk dan tidak berempati.

Kebijakan pemberian izin untuk kepentingan korporasi yang mengakibatkan deforestasi dan lemahnya pengawasan dan penegakkan hukum menyebabkan deforestasi di 3 provinsi seluas 1,2 juta hektar dalam 34 tahun¹¹³ adalah kejahatan ekologis (Ekosida). Banjir Sumatera ini lebih tepat disebut sebagai bencana buatan manusia (*Human made disaster*) mengingat penyebab dan dampaknya yang begitu parah. Bukan hanya memusnahkan makhluk hidup dan keanekaragaman hayati saja, ekosida di Sumatera menyebabkan lebih dari seribu orang meninggal dan jutaan orang terdampak, kehilangan kedamaian dan masa depannya menjadi berkurang sangat parah.

Dampak yang begitu serius, membuat ekosida sebagai penyebabnya layak kemudian menjadi kejahatan ke lima yang harus ditangani oleh *International Criminal Court (ICC)*. Selama ini

¹¹³ <https://www.kompas.id/artikel/hutan-sumatera-lenyap>





Perumusan ekosida sebagai kejahatan internasional tidak diakui karena dinilai hanya berdampak pada lingkungan dan tidak langsung kepada manusia (antroposentris). Namun dengan ekosida di Sumatera yang menyebabkan banjir ini menunjukkan bahwa kerusakan ekologis akan berpengaruh langsung kepada manusia, maka sudah seharusnya ekosida harus dihentikan dengan ditangani langsung oleh ICC.

Pemerintah sebagai pihak yang memberi izin, serta bertanggungjawab dalam hal pengawasan dan penegakkan hukum pada kawasan hutan harus menjadi subjek yang bertanggungjawab terhadap pada kejahatan ekosida ini. Begitu pula dengan Korporasi yang secara nyata menjadi pelaku deforestasi harus dimintai pertanggungjawaban pada ICC.

Pelajaran berharga dari banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumut dan Sumbar, adalah bukti nyata kerusakan hutan sangat rentan dengan terjadinya bencana jika terjadi cuaca ekstrim. Tentunya bukan hanya banjir di musim hujan, tetapi juga polusi asap karhutla di musim kemarau juga semakin berdampak.

Di samping itu, dugaan publik terhadap pemerintahan pimpinan Presiden Prabowo yang enggan menetapkan banjir bandang Sumatera karena ada niatan menutupi adanya kejahatan lingkungan dan hutan, mengingat ada aktor-aktor besar yang menjadi pelaku. Dugaan ini juga sejalan dengan catatan Jikalauhari “Dekat Dengan Elit Konglomerat, Visi-Misi Prabowo Gibran Melempem” dalam 1 tahun pemerintahannya yang selama ini terlihat begitu dekat dan memanjakan para konglomerat sehingga tidak tegas terhadap pelaku perusak hutan.¹¹⁴

Pemilik korporasi yang diduga terlibat perusakan lingkungan, mulai dari karhutla, perusak habitat satwa hingga penyebab konflik dan perampasan hak masyarakat justru berulang kali mendapat tempat istimewa, mulai diajak berkunjung ke luar negeri hingga diundang ke istana, bahkan mendapat gelar “patriot” dari program Patriot bonds karena mau meminjamkan dananya ke pemerintah.

Deforestasi Riau Meningkat, Konsesi PBPH dan Perkebunan Sawit Dominan

Lalu bagaimana kerentanan Provinsi Riau terhadap bencana? Bagaimana tata kelola hutan dan sumber daya alam di Riau selama tahun 2025?


Catatan Akhir Tahun 2025 Jikalauhari ini memuat memuat data kehutanan dan lingkungan hidup di Riau mulai dari deforestasi di Riau yang masih berlangsung sepanjang 2025 karhutla kembali meningkat, bencana banjir dan longsor berulang di wilayah yang sama. CAT 2025 ini juga memuat bagaimana kebijakan dan komitmen politik pemerintahan pusat, pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten kota.

Secara detail, CAT 2025 Jikalauhari memuat data dengan runutan, Prolog, Data Deforestasi Provinsi Riau, Persitiwa SDA-LH, Kebijakan SDA LH, Komitmen Politik Pusat-Daerah dan Epilog. Berikut CAT 2025 Jikalauhari.

Pertama, Deforestasi di Riau mencapai 24.085 hektar, meningkat 1.913 hektar dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dilihat dari penggunaan lahan, deforestasi yang terjadi di kawasan konsesi PBPH dan sawit masih dominan mencapai 40%. Deforestasi di konsesi PBPH mencapai 4.946 hektar atau 21% dan sawit 2.215 hektar atau 9% dari total deforestasi Riau pada 2025. Sedangkan kabupaten dengan deforestasi tertinggi terjadi di Rokan Hilir sebesar 4.710 hektar, atau 20% dari total deforestasi di Riau. Tutupan hutan alam yang tersisa di Riau tercatat seluas 1.315.364 hektar.

¹¹⁴ <https://jikalauhari.or.id/database/publikasi-jikalauhari/dekat-dengan-elit-konglomerat-visi-misi-prabowo-gibran-melempem/>





Kedua, Peristiwa SDA-LH masih terjadi dan cenderung meningkat. Mulai dari luas karhutla yang mencapai 19.671 hektar, meningkat tajam sebesar 78 persen atau bertambah 8.643 hektar dibandingkan tahun 2024. Sebanyak 568 hotspot atau sekitar 14 persen dari total hotspot di Riau pada 2025 berada di dalam areal konsesi PBPH dan perkebunan kelapa sawit. Dari jumlah tersebut, 185 hotspot terdeteksi di konsesi PBPH dan 383 hotspot berada di perkebunan sawit. Hotspot terbanyak di kawasan konsesi PBPH tercatat berada di areal PT Selaras Abadi Utama dengan 64 titik panas.

Selain karhutla, CAT ini juga memuat peristiwa banjir 43 kejadian banjir yang merendam 18 kecamatan di lima kabupaten dan longsor jalan lintas Ujung Batu- Rokan IV Koto di Rokan Hulu dan di Kecamatan Batang gangsal, Indragiri Hulu. Selain itu pada 8 Desember 2025 BMKG mempublikasi 93 kecamatan dan 170 desa di Riau masuk kategori rawan banjir, sementara 23 kecamatan dan 36 desa berada di zona rawan longsor.¹¹⁵

Sepanjang 2025, Jikalauhari merangkum 7 konflik hutan tanah terjadi antara masyarakat dengan korporasi. Salah satu konflik yang paling menyita perhatian seperti konflik PT SSL dengan masyarakat kampung Merempan Hulu dan Kampung Tumang di Siak yang mengakibatkan 12 warga diproses hukum dan divonis hukuman penjara 1,5 hingga 3 tahun.

Peristiwa lainnya adalah masih terjadinya serangan harimau yang menewaskan seorang pekerja perkebunan. Pada 13 Maret 2025, seorang pekerja perkebunan di Kabupaten Pelalawan tewas diterkam Harimau Sumatera¹¹⁶. Lalu di Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti, seekor Harimau Sumatera memangsa sapi milik warga pada 30 Juni 2025.¹¹⁷

Pencemaran lingkungan juga terjadi di tahun ini, Pada Mei 2025, terjadi dugaan pencemaran Sungai Singingi di Kabupaten Kuantan Singingi yang diduga berasal dari limbah air cucian Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Sinergi Inti Makmur. Limbah tersebut dialirkan langsung ke sungai tanpa pengolahan yang memadai dan berdampak pada kematian ikan serta penurunan kualitas ekosistem sungai yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.¹¹⁸ Lalu pada November 2025 di Sungai Lanjung, Kabupaten Siak pencemaran diduga dipicu oleh pembangunan kanal PKS PT Karina Ersada Sejahtera yang menyebabkan air sungai menjadi keruh dan berbau.

Selanjutnya, peristiwa memilukan terjadi di Segati, Kecamatan Langgam, Pelalawan. Pada Februari 2025, kecelakaan kerja terjadi di area konsesi PT Nusa Wana Raya (APRIL Group).¹¹⁹ Mobil bak terbuka jenis Colt Diesel yang mengangkut pekerja PT Empat Res Bersaudara (ERB) beserta anggota keluarganya terjun ke Sungai Segati. Peristiwa ini mengakibatkan 14 orang, termasuk tujuh anak-anak, dan satu orang dinyatakan hilang. Kendaraan tersebut diketahui tidak diperuntukkan sebagai angkutan penumpang dan melanggar ketentuan keselamatan kerja. Dan beberapa kecelakaan kerja lainnya.

Sepanjang 2025, klipings media koran Riau Pos dan Tribun Pekanbaru yang dikompilasi Jikalauhari mencatat sebanyak 318 pemberitaan terkait persoalan sumber daya alam dan lingkungan hidup (SDA-LH) di Provinsi Riau. Dari jumlah tersebut, isu kebakaran hutan dan

¹¹⁵ <https://mediacenter.riau.go.id/read/94435/206-desa-dan-116-kecamatan-di-riau-dipetakan-.html>


¹¹⁶ <https://www.goriau.com/berita/baca/diserang-Sga-harimau-di-hutan-inhu-petani-damar-selamat-setelahSnju-anak-harimau-hingga-terpental.html>

¹¹⁷ <https://www.cakaplah.com/berita/baca/125036/2025/07/03/harimau-sampale-mangsa-ternak-warga-di-pelalawan-bbksda-riau-pasang-perangkap#sthash.KuEMCoYN.dpbs>

¹¹⁸ <https://www.cakaplah.com/berita/baca/123782/2025/05/27/sungai-singingi-tercemar-limbah-pks-klhk-diminta-turun-tangan#sthash.RQ7KDXGh.dpbs>

¹¹⁹ <https://jikalauhari.or.id/kabar/rilis/april-grup-harus-bertanggung-jawab-tragedi-menelan-korban-jiwa-akibat-abai-regulasi-dan-ham/>





lahan (karhutla) menjadi tema yang paling banyak diberitakan dengan total 111 berita. Isu banjir menempati urutan kedua dengan 50 berita, disusul keanekaragaman hayati sebanyak 44 berita dan konflik masyarakat sebanyak 41 berita.

CAT ini juga memuat berbagai upaya masyarakat sipil, khususnya Jikalauhari dalam memperjuangkan upaya perlindungan dan pemulihan SDA-LH, baik melalui kebijakan, penegakkan hukum, pendampingan masyarakat, kajian lingkungan hingga penggalangan dukungan publik.

Ketiga, Kebijakan SDA-LH dari Pusat hingga Daerah. CAT 2025 Jikalauhari merangkum 24 kebijakan di sektor SDA-LH dari level pemerintah pusat hingga pemerintah kabupaten-kota. Berbagai kebijakan yang diterbitkan memiliki implikasi yang berbeda-beda dan sangat bergantung pada siapa pelaksananya. Namun disini yang lain, terdapat peraturan perundang-undangan yang lahir diduga bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Salah satu kebijakan tersebut adalah PP Nomor 45 Tahun 2025 di mana Satgas PKH mendapat kewenangan untuk melakukan inventarisasi data dan informasi kegiatan usaha yang terbangun dalam kawasan hutan bersama Menteri Kehutanan. Sebelumnya, kewenangan ini hanya berada di kendali Menteri Kehutanan.

Keempat, Jikalauhari memotret komitmen dan keberpihakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota terhadap perlindungan dan pemulihan SDA-LH. Meningkatnya deforestasi, pembakaran hutan dan lahan, konflik lahan tidak lepas dari posisi pemerintah.

CAT 2025 Jikalauhari juga membuat penilaian terhadap kerusakan SDA-LH di tingkat kabupaten/kota, dilihat dari 4 variabel, deforestasi, karhutla, banjir dan konflik. Rokan Hilir dinilai sebagai kabupaten dengan ekosistem SDA-LH terburuk. Sementara itu, penilaian terhadap respon pemerintah terhadap isu SDA-LH, Siak menjadi Kabupaten yang paling berkomitmen dalam merespon permasalahan SDA-LH.

Menata Ulang Tata Ruang, Cabut Izin Korporasi di DAS

Dari peristiwa banjir dan longsor di Sumatera yang menimbulkan lebih dari seribu orang meninggal serta kerusakan yang mengakibatkan kerugian mencapai 68 triliun rupiah,¹²⁰ harus diakhiri dengan evaluasi tata ruang secara total. Sudah jelas bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan sudah berlebih dan tak mampu lagi. Daerah aliran sungai harus dikembalikan pada fungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami. Perizinan PBPH, Perkebunan sawit dan pertambangan di DAS harus dievaluasi dan dicabut total untuk mengembalikan dan pertahankan tutupan hutan alami.


Begitu juga di provinsi Riau, perizinan di wilayah DAS dan aktivitas usahanya mengakibatkan deforestasi dan rusaknya ekosistem. Sehingga akan menyebabkan kekeringan di musim kemarau berakibat pada meningkatnya karhutla, serta banjir di musim hujan.

Oleh sebab itu, Jikalauhari mendesak:

1. Presiden Prabowo segera menetapkan status Bencana Nasional Banjir Sumatera dan mengevaluasi Tata Ruang pasca bencana banjir dan longsor termasuk mencabut izin korporasi PBPH, perkebunan dan pertambangan di seluruh DAS.

¹²⁰ <https://money.kompas.com/read/2025/12/08/083931626/kerugian-banjir-sumatera-capai-rp-6867-triliun-siapa-tanggung-jawab>



- 
-
2. Presiden Prabowo tidak takut oligarki perusak Ekologis dan segera memerintahkan Menhut, Jaksa Agung dan Kepolisian menindak korporasi perusak hutan.
 3. Presiden Prabowo, mengevaluasi kebijakan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan berisiko melanjutkan perusakan hutan.
 4. Gubernur Riau dan DPRD membahas Perda RTRWP Riau dengan mengedepankan penyelamatan hutan alam tersisa, serta mengakomodir hak masyarakat adat serta proses pembentukan yang dilakukan secara transparan, partisipatif dan akuntabel.
 5. Gubernur Riau mempercepat penyelesaian konflik SDA dengan pengakuan terhadap hak masyarakat adat dan tempatan serta mempercepat realisasi ruang kelola masyarakat berupa perhutanan sosial mulai dari perizinan hingga ke pada pengelolaannya.
 6. Bupati/Walikota se Riau, segera mengarusutamakan isu perlindungan dan pemulihan SDA-LH.

####



Khalahni

CATATAN AKHIR TAHUN 2025

Setelah Bencana Ekologis Sumatera,
Menata Ulang Tata Ruang & Cabut Izin Korporasi di DAS

